

RENJA

RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM



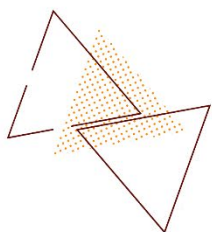
(0541) 743364



rsjdahm@gmail.com



rsjdahm.kaltimprov.go.id



2026





GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dan disempurnakan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 46);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 selanjutnya disebut Renja PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Pasal 2

- (1) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
- BAB I. Pendahuluan;
 - BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan;
 - BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan;
 - BAB V. Penutup.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
4. Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Dinas Sosial;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
11. Dinas Lingkungan Hidup;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
18. Dinas Kelautan dan Perikanan;
19. Dinas Pariwisata;
20. Dinas Perkebunan;
21. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

22. Dinas Kehutanan;
23. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
24. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
25. Sekretariat Daerah;
26. Sekretariat DPRD;
27. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
28. Badan Pendapatan Daerah;
29. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
30. Badan Kepegawaian Daerah;
31. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
32. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
33. Badan Penghubung Provinsi;
34. Inspektorat Daerah;
35. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 12 September 2025
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 12 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 47.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Atma Husada Mahakam Tahun 2026. Dokumen ini merupakan wujud komitmen RSJD Atma Husada Mahakam dalam memperkuat perencanaan yang terarah, terukur, dan selaras dengan visi dan misi Provinsi Kalimantan Timur.

Penyusunan Renja ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 7 Ayat (2) yang menyatakan bahwa "*Rencana Kerja pemerintah daerah disusun oleh satuan kerja perangkat daerah berdasarkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.*" Selain itu, proses penyusunan ini juga mengikuti pedoman teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur secara sistematis tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, termasuk tahapan penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

Renja Tahun 2026 ini disusun sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2025–2029, yang menjadi arah kebijakan dan landasan pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam. Melalui dokumen ini, kami berharap dapat menjawab tantangan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks serta turut berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional dan daerah.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam proses penyusunan dokumen ini. Saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan guna penyempurnaan dokumen ini. Demikian Rencana Kerja Tahun 2026 ini dibuat agar dapat dipergunaka dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 07 September 2025
Direktur RSJD Atma Husada Mahakam
Provinsi Kalimantan Timur



dr. Indah Puspitasari, MARS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670530 199803 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	2
1.1.1. Pengertian Ringkas Tentang Renja Perangkat Daerah	2
1.1.2. Proses Penyusunan Rencana Kerja Renja Perangkat Daerah	3
1.1.3. Keterkaitan Antara Rencana Kerja Perangkat Daerah Dengan Dokumen RKPD.....	4
1.1.4. Keterkaitan Antara Renja Dengan Renstra Perangkat	5
1.1.5. Keterkaitan Antara Rencana Kerja Renja Perangkat.....	5
1.1.6. Keterkaitan Antara Rencana Kerja Dengan Renja Kabupaten/Kota.....	9
1.1.7. Tindak Lanjutnya dengan Proses Penyusunan RAPBD...	9
1.2. Landasan Hukum.....	10
1.2.1. Undang-undang	10
1.2.2. Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan	10
1.2.3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	11
1.2.4. Peraturan Lainnya tentang SOTK, kewenangan Perangkat.....	12
1.3. Maksud dan Tujuan	13
1.4. Sistematika Penulisan	13
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH.....	15
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	16
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	36
2.2.1. Kajian Terhadap Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	37
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD.....	39
2.3.1. Permasalahan Dan Hambatan	39
2.3.2. Tujuan dan Sasaran RSJD Atma Husada Mahakam Tahun 2025-2029	41
2.3.3. Dampaknya terhadap capaian program nasional /	42
2.3.4. Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan.....	46
2.4. Review Terhadap Rencana RKPD	57
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	62
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	65

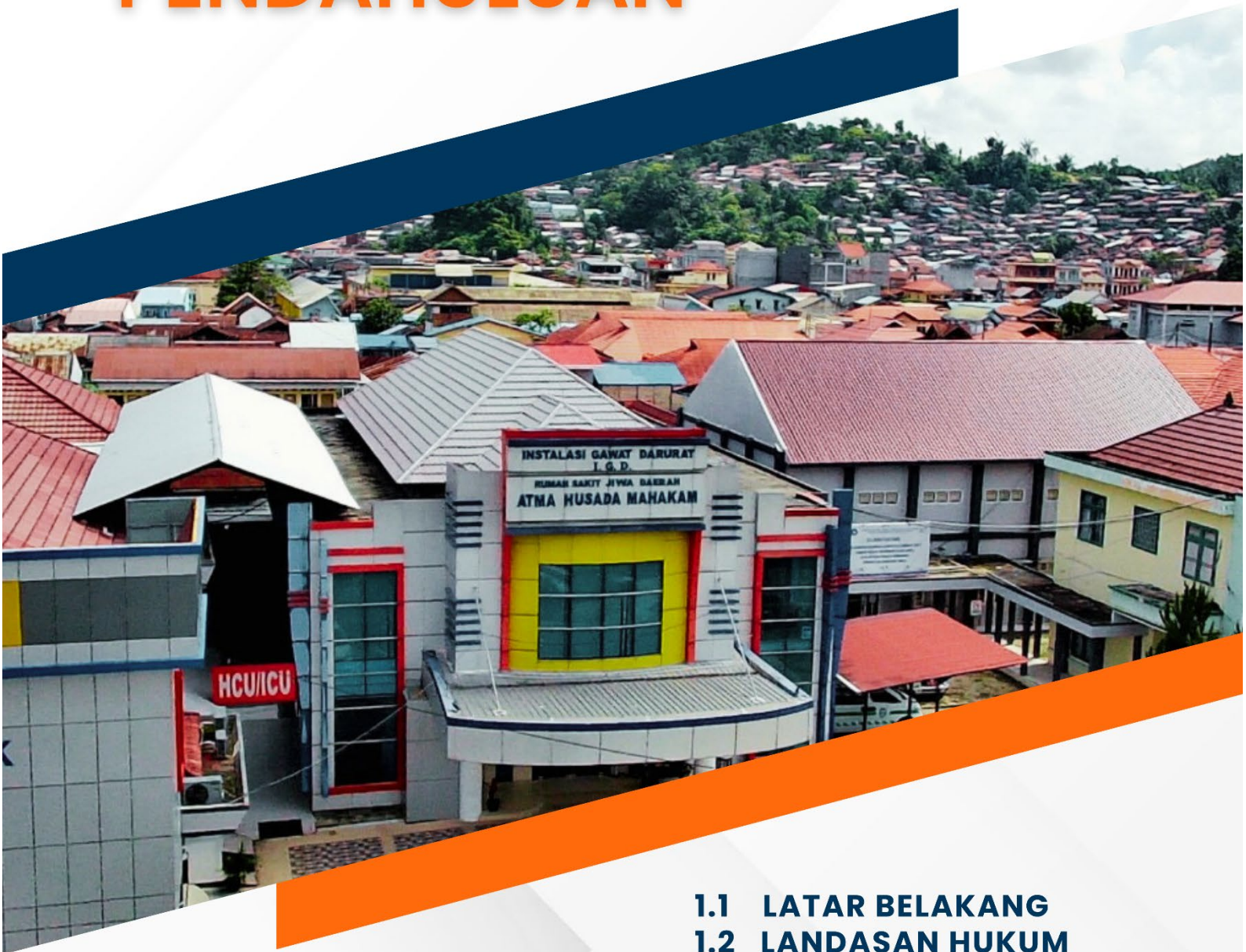
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	66
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	70
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	70
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH....	73
4.1.Rencana Dan Pendanaan RSJD AHM Provinsi.....	74
BAB V. PENUTUP	84
5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja 2026	85
5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	85
5.3. Rencana Tindak Lanjut	86

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 EVALUASI KINERJA PROGRAM.....	17
TABEL 2.2 EVALUASI KINERJA KEGIATAN	19
TABEL 2.3 EVALUASI KINERJA SUB KEGIATAN	22
TABEL 2.4 (T-C 29) REKAPITULASI EVALUASI PELAKSAAAN RENJA	30
TABEL 2.5 (T-C 30) PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN.....	38
TABEL 2.6 (T-C 31) REVIEW TERHADAP RENJA RKPD TAHUN 2026..	58
Tabel 2.7 (T-C 32) USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN	63
Tabel 4.1 (T-C 33) RUMUSAN RENJA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027.....	76

BAB I

PENDAHULUAN



- 1.1 LATAR BELAKANG**
- 1.2 LANDASAN HUKUM**
- 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**
- 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memperbaiki kemaslahatan umat manusia PBB telah mencanangkan *Sustainable Development Goals* (SDG) yang mencakup 17 bidang target yang diupayakan tercapai pada tahun 2030 mendatang. Salah satu bidang dari SDG yang menjadi sorotan adalah bidang kesehatan, karena akan berdampak langsung pada kualitas sumberdaya manusia dan tingkat kesejahteraan manusia 12 tahun ke depan yaitu pada tahun 2030.

Isu kesehatan jiwa merupakan salah satu target yang tercantum dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), namun sering terabaikan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat setidaknya satu dari empat orang di dunia pernah mengalami masalah kejiwaan sepanjang hidupnya. Sedang di Indonesia menurut Survei Global Health data tahun 2017 menunjukkan ada 27,3 juta orang di Indonesia yang mengalami masalah kejiwaan, Hal ini berarti setidaknya ada satu dari sepuluh orang di negara ini sedang mengalami masalah kejiwaan. Membuat Indonesia menjadi negara dengan pengidap gangguan jiwa tertinggi di kawasan Asia Tenggara serta menjadi salah satu negara dengan pencegahan dan penanganan gangguan jiwa yang terburuk. diperlukan sinergitas yang baik antara Pemerintah dan Masyarakat dalam menyikapi permasalahan ini.

Renja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.1.1. Pengertian Ringkas Tentang Renja Perangkat Daerah

Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat RSJD AHM pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

1.1.2. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

Proses penyusunan Renja Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja RKPD Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu penyusunan Renja Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur.

Mengingat arti strategis Rencana Kerja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen Renja RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain:

1. Disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan;
2. Program dan Kegiatan dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029;
3. Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Provinsi;
Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.1.3. Keterkaitan Antara Rencana Kerja Perangkat Daerah Dengan Dokumen RKPD

Penyusunan Renja Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renja RKPD Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu penyusunan Renja Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Renja RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur.

Penyusunan Renja ini telah memperhatikan berbagai ketersediaan sumber daya yang ada, sehingga dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan, Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma

Husada Mahakam berupaya seoptimal mungkin memberikan fasilitas pelayanan yang terbaik sesuai kapasitas dan fungsinya.

1.1.4. Keterkaitan Antara Renja Dengan Renstra Perangkat Daerah

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, kedudukan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dengan dokumen perencanaan ditingkat atas. Renja perangkat daerah disusun oleh pimpinan sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya untuk mendukung pencapaian target-target kinerja didalam Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dan akan bermuara dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah sebagai dokumen turunan dari RKPD.

Renja Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur periode 2025-2029 guna memberikan arah, kebijakan dan strategi yang hendak ditempuh selama 3 (Tiga) tahun ke depan.

1.1.5. Keterkaitan Antara Rencana Kerja Renja Perangkat Daerah Dengan Renja K/L

Perangkat Daerah mempersiapkan dokumen yang menjadi dasar pencantuman target kinerja kegiatan dan alokasi anggarannya pada Kertas Kerja RKA-KL:

1. Daftar alokasi anggaran masing-masing unit eselon I yang dirinci per Perangkat Daerah dan sumber dananya berdasarkan Pagu Sementara yang ditandatangani oleh pejabat eselon I;

2. Peraturan perundangan mengenai struktur organisasi dan tugas fungsinya;
3. Standar Biaya;

Tugas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan RKA-KL adalah menyusun Kertas Kerja RKA Perangkat Daerah yang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengetahui Dasar Alokasi Anggaran Satker
2. Berdasarkan Daftar alokasi anggaran per Satker dan sumber dana, satker menyusun Rencana Kerja dan anggarannya. Dasar alokasi anggaran tersebut berguna sebagai kontrol batas tertinggi alokasi anggaran satker pada akhir penyusunan KK RKA-KL.
3. Kegiatan yang akan dilaksanakan beserta output kegiatan yang dihasilkan (sesuai karakteristik satker). Jenis kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari kegiatan generik atau teknis;
4. Peruntukan alokasi anggaran sesuai dengan prioritas sebagaimana diuraikan sebelumnya;
5. Mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal melalui penggunaan komponen input/rincian biaya dalam rangka pencapaian output kegiatan dengan memanfaatkan penyediaan / penyajian makanan dan snack berbasis pangan lokal non beras, non terigu, sayuran dan buah sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah;
6. Komponen input dalam rangka pencapaian output kegiatan yang dibatasi dalam hal Iklan layanan masyarakat kecuali untuk :
 - a. Iklan yang mengajak/mendorong partisipasi masyarakat untuk turut aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan program/kebijakan Pemerintah. Contohnya, iklan mengenai: cara penanggulangan suatu penyakit menular,

mendukung keberhasilan program pendidikan sembilan tahun, ajakan untuk bayar pajak; dan

- b. Tetap mempertimbangkan bahwa manfaat sosial dan ekonomi yang dihasilkan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan.

Untuk biaya masukan/keluaran yang belum tercantum dalam PMK tentang Standar Biaya maka Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) yang bertanggung jawab atas suatu kegiatan wajib membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang menyatakan bahwa PA/KPA bertanggung jawab penuh atas satuan biaya yang digunakan dalam penyusunan RKA-KL diluar Standar Biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

7. Pelaksanaan Pencapaian Output Kegiatan

Perincian biaya Komponen Input dalam KK RKA-KL meliputi penyajian informasi item-item biaya yang akan dibelanjakan dalam rangka pencapaian output suatu kegiatan. Penyajian informasi dimaksud terkait cara pelaksanaan suatu kegiatan (secara swakelola atau kontraktual). Langkah penyajian informasi tersebut sebagai berikut:

a. Swakelola

- 1) Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang direncanakan akan dilakukan secara swakelola, dirinci menurut jenis belanja yang sesuai. Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang sifatnya non fisik dan menggunakan jenis Belanja Barang. Contoh Kegiatan Diklat Teknis PNS.
- 2) Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang sifatnya non fisik dan menggunakan jenis belanja Bantuan Sosial dan Belanja Barang. Contoh Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

b. Kontraktual

Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang direncanakan akan dilakukan secara kontraktual dimasukkan pada satu jenis belanja yang sesuai

8. Informasi Pengadaan Barang dan Jasa K/L melalui Proses Pelelangan Sebagai bentuk transparansi kegiatan pemerintahan, K/L diharapkan memberi informasi mengenai rencana pengadaan barang dan jasa melalui proses pelelangan. Kriteria pengadaan barang dan jasa melalui kontraktual yang perlu diinformasikan meliputi: nilai pengadaan barang dan jasa di atas 100 juta; dan rencana waktu pelaksanaan pengadaannya. Informasi tersebut dicantumkan pada saat penyusunan RKA-KL.

Penyusunan RKA-KL untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh satker BLU, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta Pelaksanaan Anggaran BLU. Dalam rangka penyusunan anggaran satker BLU agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Satker BLU menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada strategi bisnis;
2. RBA BLU memuat seluruh program, kegiatan, anggaran penerimaan/pendapatan, anggaran pengeluaran/belanja, estimasi saldo awal dan estimasi saldo akhir kas BLU;
3. RBA disusun berdasarkan:
 - a. Basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya; dan
 - b. Kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat.
4. Satker BLU yang telah mampu menyusun standar biaya menurut jenis layanannya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya maka penyusunan RBA-nya menggunakan standar biaya tersebut, sedangkan untuk

satker BLU yang belum mampu menyusun standar biaya, RBA disusun berdasarkan SBU;

5. Pagu dana pada ikhtisar RBA pada komponen PNPB dan Rupiah Murni (RM) harus sama dengan alokasi anggaran pada pagu sementara.

1.1.6. Keterkaitan Antara Rencana Kerja Dengan Renja Kabupaten/Kota

RSJD Atma Husada Mahakam adalah Rumah Sakit Khusus Provinsi Kalimantan Timur sebagai Organisasi Bersifat Khusus (OBK) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, dimana pada saat penyusunan Renja walaupun tidak memiliki UPTD tetapi tetap mempertimbangkan dan memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai konsumen, termasuk masyarakat di beberapa Kabupaten pada Provinsi Kalimantan Timur. Contohnya untuk masyarakat yang berada pada daerah yang jangkauan aksesnya sangat jauh dari RSJD Atma Husada Mahakam, untuk pelayanan rawat jalan terkait obat-obatan akan menyesuaikan dengan kebutuhan pasien dan jarak akses sehingga perawatan di rumah tetap dapat dilakukan secara berkesinambungan. Dengan demikian persediaan Obat-obatan juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan pasien.

1.1.7. Tindak Lanjutnya dengan Proses Penyusunan RAPBD

Penyusunan Renja RSJD Atma Husada Mahakam dimulai dari tahapan persiapan, penyusunan Rancangan awal Renja, Rancangan Renja, Rancangan akhir Renja, Penyusunan Renja, dan Penetapan Renja RSJD Atma Husada Mahakam. Mekanisme dan waktu penyusunan Renja RSJD Atma Husada Mahakam bersinergi dengan penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur, karena pada dasarnya RKPD Provinsi Kalimantan Timur merupakan rangkuman dari seluruh Renja Perangkat Daerah

yang dikolaborasikan menjadi dokumen perencanaan tahunan daerah Provinsi Kalimantan Timur.

1.2. Landasan Hukum

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur berpedoman kepada peraturan yang berlaku antara lain :

1.2.1. Undang-undang :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

1.2.2. Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 No. 21, Tambahan Lembaran Negara No. 4817);
3. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

1.2.3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

1. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2005-2026;
2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

1.2.4. Peraturan Lainnya tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1. Peraturan Daerah Kalimantan Timur No. 06 Tahun 2011 tentang Perubahan PERDA No 10 Tahun 2008 tentang SOTK RSJD Atma Husada Mahakam Prov Kal-Tim;
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 81 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Rumah Sakit Jiwa daerah Atma Husada Mahakam;
4. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 188.44/K.620/2013 tanggal 15 Agustus 2013 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur sebagai Badan Layanan Umum Daerah. dengan status Badan Layanan Umum Daerah Penuh;
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dan sub kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan di RSJD Atma Husada mahakam.
2. Memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan Organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rencana RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

- 5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja 2026
- 5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan
- 5.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUSI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU



- 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
- 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.3. ISU-ISU PANTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
- 2.4. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
- 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2025. Pada tahun anggaran 2025 Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan dengan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) murni sebesar Rp114.981.605.000,00 dengan rincian belanja operasional Rp104.841.839.898,00 dan Belanja Modal Rp10.139.765.102,00.

Dengan adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Instruksi Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 sehingga anggaran APBD dan BLUD pergeseran menjadi sebesar Rp107.615.052.216,00 dengan rincian Belanja Operasional Rp103.189.177.037,00 dan Belanja Modal Rp4.425.875.179,00.

Adapun realisasi anggaran pada Triwulan ke-3 yaitu Belanja Operasional sebesar Rp61.107.463.596,00 (62,16%), Belanja Modal sebesar Rp2.416.496.149,00 (53,55%) dan BLUD Rp14.154.320.640,00 (58,57%) sehingga total realisasi anggaran pada Triwulan ke-3 tahun 2025 sebesar Rp67.450.170.625,00.

Pelaksanaan untuk program-program Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur pada Triwulan ke-3 Tahun 2025 dapat diberikan gambaran sebagai berikut:

TABEL 2.1 EVALUASI KINERJA PROGRAM RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM
TRIWULAN KE-3 TAHUN 2025

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA PERTAHUN			KINERJA TRIWULAN 3			ANGGARAN PERTAHUN			ANGGARAN TRIWULAN 3			FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA	PENAGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Manajemen Rumah sakit yang transparan dan akuntabel (Program)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	84	87,27	103,89	84	87,27	103,89	103.000.737.619	66.070.520.460	64,15	28.179.094.964	66.070.520.460	234,47	1. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu 2. Tersedianya realisasi anggaran sesuai target 3. Meningkatnya SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 4. Terdokumentasinya pencatatan sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	Tidak ada faktor penghambat yang signifikan terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Mempercepat realisasi keuangan untuk APBD-P 2025 2. Meningkatkan Capaian SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSJD Atma Husada Mahakam
			Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100							Ditindaklanjuti seluruh keluhan layanan yang ada pada survei kepuasan masyarakat secara keseluruhan dan berkelanjutan		Survei IKM Semester II Tahun 2025 sedang proses pelaksanaan oleh pihak ketiga (LP2M) Unmul	
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA terpadu (Program)	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RS AHM)	%	93,78	100	106,63	93,75	100	106,67	3.541.698.597	1.100.872.263	31,08	394.429.460	1.100.872.263	279,10	Tersedianya dokter spesialis, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya yang telah terlatih sesuai standar pelayanan jiwa.	Pelaporan Indikator capaian SPM terealisasi di triwulan ini	Melakukan audit internal capaian indikator SPM setiap triwulan, disertai umpan balik dan perbaikan sistem.	Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan RSJD Atma Husada Mahakam

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA PERTAHUN			KINERJA TRIWULAN 3			ANGGARAN PERTAHUN			ANGGARAN TRIWULAN 3			FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA	PENAGGUNG JAWAB
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Optimalnya kualitas pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian (Program)	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (RSJD Atma Husada Mahakam)	%	93	95,58	102,77	40,00	95,58	238,95	1.072.616.000	140.877.901	13,13	238.754.000	140.877.901	59,01	ASN dapat mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi dengan berbagai metode, baik dengan IHT, Seminar, Webinar, magang dan lain-lain	Beberapa ASN ada yang belum mengupload sertifikatnya dalam SIM-ASN	Melakukan himbauan kepada seluruh ASN untuk melakukan Upload Sertifikat pada aplikasi SIM-ASN pasca pelatihan, agar juga menghimbau pada seluruh ASN untuk mengikuti pelatihan baik diselenggarakan oleh Rumah Sakit maupun penyelenggara diklat yang lain	Wakil Direktur Penunjang dan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian RSJD Atma Husada Mahakam

**TABEL 2.2 EVALUASI KINERJA KEGIATAN RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM
TRIWULAN KE-3 TAHUN 2025**

NO.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	AKTIVITAS	SATUAN	KINERJA PERTAHUN			KINERJA TRIWULAN 3			ANGGARAN PERTAHUN			ANGGARAN TRIWULAN 3			FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA	PENANGGUNG JAWAB
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang baik dan tepat waktu (Kegiatan)	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan	1. Melaksanakan penyusunan rancangan akhir renja dengan menyesuaikan pagu yang telah ditetapkan dalam rancangan akhir rkpj tahun 2026 serta kebutuhan rsjd ahm 2. Melaksanakan penyusunan rancangan renstra 2025-2029 rsjd ahm dengan melibatkan stake holder terkait	%	100	80	80	60	80	133,33	Rp 215.622.000,00	Rp 27.635.000,00	12,82	Rp 92.332.000,00	Rp 27.635.000,00	29,93	1. Kecermatan dalam perencanaan kinerja dan anggaran 2. Kreativitas dan implementasi yang tepat dari perencanaan kinerja 3. Para pihak mampu memberikan solusi untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dengan baik	Terdapat beberapa faktor penghambat dalam proses pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tetapi telah dapat diatasi dengan upaya yang efektif	Menyusun dokumen dengan tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan	Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSJD Atma Husada Mahakam
				3. Mengumpulkan bahan/data capaian kinerja bulan Juli - September 2025 dari penanggungjawab data kinerja														1. keterlibatan pemimpin dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi kinerja 2. kerjasama yang baik dan saling mendukung dari semua pihak/tim yang terlibat didalam upaya pencapaian kinerja	1. Kurangnya kesadaran mengenai pentingnya penyediaan data yang akurat dan tepat waktu oleh penanggung jawab data kinerja 2. Data terkait realisasi keuangan perbulan dari Biro Adbang yang tidak konsisten (dapat berubah)	1. Berkoordinasi dengan atasan yang bertanggung jawab atas data kinerja pada setiap kegiatan 2. Melakukan penyesuaian terhadap data realisasi keuangan didalam laporan kinerja	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan (Kegiatan)	Persentase Penyediaan Gaji dan pelaksanaan penatausahaan keuangan tepat waktu	1. Melaksanakan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN setiap bulannya 2. Melaksanakan pembayaran honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan berdasarkan beban kerja 3. Melaksanakan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	%	100	83,33	83,33	75	83,33	111,11	Rp 65.705.658.593,00	Rp 17.700.167.862,00	26,94	Rp 19.796.196.168,00	Rp 17.700.167.862,00	89,41	Terlaksananya penyediaan Gaji dan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan kepada seluruh pegawai ASN	1. Sistem UOBK yang mempengaruhi ketepatan waktu penyediaan gaji dan pelaksanaan penatausahaan keuangan 2. Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD mengalami efisiensi belanja perjalanan dinas sehingga perjalanan dinas untuk penagihan piutang dan rekonsiliasi terbatas	1. Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN dalam proses untuk menjadi satu dengan DPA Dinas Kesehatan 2. Kegiatan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sisa dokumen feedback/piutang untuk segera direalisasikan	Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSJD Atma Husada Mahakam

NO.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	AKTIVITAS	SATUAN	KINERJA PERTAHUN			KINERJA TRIWULAN 3			ANGGARAN PERTAHUN			ANGGARAN TRIWULAN 3			FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA	PENANGGUNG JAWAB
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan	Persentase pemenuhan pakaian kerja pegawai	Tidak dilaksanakan karena Instruksi Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025	%	100	0	0	0	0	0	Rp -	-	0	Rp -	-	0	Tidak dilaksanakan dan akan dilakukan verifikasi anggaran bersama TIM TAPD dalam penetapan DPA Perubahan	Dalam rangka melaksanakan Instruksi Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 yang sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapaan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 sehingga dilakukan efisiensi belanja pada Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Belanja Pakaian Batik Tradisional dan Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH).	Sesuai dengan rencana kerja PPK dan PPTK, bahwa kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah akan dilakukan pergeseran	Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSJD Atma Husada Mahakam
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tertib (Kegiatan)	Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Rumah Sakit	1. Melaksanakan Penyediaan Komponen Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi, Alat Listrik, dan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2. Melaksanakan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Bahan Bangunan dan Konstruksi, Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, dan Bahan Komputer 3. Melaksanakan Penyediaan Peralatan Bahan Kimia, Perabot Kantor dan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4. Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kedalam dan luar daerah serta Biaya Konsumsi	Dokumen	79	74	93,67	60	74	123,33	Rp 1.079.394.464,00	Rp 371.350.420,00	34,40	Rp 182.400.000,00	Rp 371.350.420,00	203,59	Terlaksananya administrasi umum RS untuk belanja Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Rumah Sakit	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan Dokumen Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang tertuang dalam anggaran APBD 2025	1. Melaksanakan belanja penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang tertuang dalam anggaran APBD 2025 2. Mempersiapkan pelaksanaan APBD P 2025	Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSJD Atma Husada Mahakam
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terencana dengan baik (Kegiatan)	Persentase Ketepatan Pengadaan sesuai perencanaan	Melaksanakan Pengadaan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor, Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor dan Mebel	%	100	99,89	99,89	75	99,89	133,19	Rp 2.162.462.219,00	Rp 1.810.868.681,00	0,00	Rp -	Rp 1.810.868.681,00	0,00	Dilaksanakannya pengadaan sesuai target pada rencana anggaran kas dan arahan pimpinan sesuai anggaran pergeseran TA 2025	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan mengalami efisiensi sehingga tidak dapat realisasi	1. Melakukan pembelanjaan pada Belanja Modal Alat Penyimpan Kantor dan Belanja Modal Peralatan Jaringan 2. Melakukan belanja sesuai dengan target rencana anggaran kas	Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSJD Atma Husada Mahakam

NO.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	AKTIVITAS	SATUAN	KINERJA PERTAHUN			KINERJA TRIWULAN 3			ANGGARAN PERTAHUN			ANGGARAN TRIWULAN 3			FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA	PENANGGUNG JAWAB
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien (Kegiatan)	Persentase Nilai Survei kepuasan pegawai terhadap kenyamanan tempat kerja	Melaksanakan survei kepuasan pegawai terhadap kenyamanan tempat kerja	%	78,4	86,1	109,8	78,4	86,1	109,82	Rp 10.272.591.844,00	Rp 2.294.174.914,00	22,33	Rp 2.397.242.196,40	Rp 2.294.174.914,00	95,70	Dilaksanakannya Survei Kepuasan Pegawai dengan baik, tepat waktu, dan dapat dipertanggung jawabkan guna mengidentifikasi kebutuhan dan kenyamanan pegawai di tempat kerja	Survei dilaksanakan oleh pihak ketiga (LP2M) Unmul sehingga pengumpulan dokumen menyesuaikan waktu pihak ketiga	Survei Kepuasan Pegawai dalam proses pembuatan laporan	Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSJD Atma Husada Mahakam
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang optimal (Kegiatan)	Persentase BMD pada RSJD AHM yang berfungsi dengan baik	Melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dan operasional atau lapangan sehingga dapat berfungsi dengan baik	%	72,21	92,3	127,82	72,21	92,3	127,82	Rp 565.008.499,00	Rp 51.595.000,00	9,13	Rp 7.500.000,00	Rp 51.595.000,00	687,93	Dilakukannya pencatatan terhadap BMD (kendaraan) Pada RSJD AHM yang berfungsi dengan baik dan optimal	Ketidak cocokan data antara pencatat dan pelaksana BMD dilapangan	Melakukan evaluasi terhadap pencatatan BMD (kendaraan) secara berkala	Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSJD Atma Husada Mahakam
8	Peningkatan pelayanan BLUD	terwujudnya pelayanan BLUD yang semakin meningkat (Kegiatan)	Persentase pendapatan hasil pelayanan terhadap target BLUD	Melaksanakan Peningkatan Pelayanan untuk belanja Pegawai, Operasional dan Belanja Modal BLUD	%	100	91	91	100	91	91	Rp 23.000.000.000,00	Rp 14.154.320.639,00	61,54	Rp 5.703.424.600,00	Rp 14.154.320.639,00	248,17	Dilaksanakannya pelayanan pada RSJD AHM dengan optimal sehingga meningkatkan pendapatan BLUD RS	Dengan berjalannya Efisiensi Anggaran APBD 2025 sehingga beban penggunaan pendapatan BLUD lebih banyak dari tahun sebelumnya karena menutupi belanja operasional yang tidak dapat dilaksanakan melalui APBD	1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pendapat BLUD secara berkala 2. Persiapan pelaksanaan BLUD Perubahan 3. Melaporkan pendapatan setiap bulan kepada Badan Penerimaan Daerah	Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSJD Atma Husada Mahakam
1	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi sesuai standar (Kegiatan)	Angka kunjungan rawat jalan	Melaksanakan penyediaan layanan kesehatan Home Visite, serta Family Gathering dan Forum Konsultasi Publik terkait masalah Kesehatan Jiwa yang sesuai dengan standar	Orang	28.950	25.399	87,73	21.705	25,399	117,02	Rp 416.838.000,00	Rp 965.015.648,00	231,51	Rp 52.210.000,00	Rp 965.015.648,00	1848,33	Pelayanan yang cepat dan efisien, termasuk sistem antrean offline atau online	Kendala teknologi, seperti sistem antrean atau rekam medis elektronik yang sering mengalami gangguan internet	Pengembangan klinik rawat jalan spesialis/subspesialis untuk menarik lebih banyak pasien	Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan RSJD Atma Husada Mahakam dan Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSJD Atma Husada Mahakam
2	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi sesuai dengan kebutuhan (Kegiatan)	Nilai Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK)	Melaksanakan penyediaan pelayanan terkait Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK) mencakup inventarisasi, verifikasi, dan analisis data terkait fasilitas kesehatan untuk memastikan kesesuaian dengan standar regulasi	%	95	92,72	97,60	92	92,72	100,78	Rp 3.119.069.077,00	Rp 79.591.155,00	2,55	Rp 340.659.080,00	Rp 79.591.155,00	23,36	Tersedianya petugas yang kompeten dalam penginputan data ASPAK	Data tidak lengkap atau tidak terupdate terkait sarana prasarana dan alat kesehatan di triwulan satu telah terealisasi	Menunjuk petugas khusus atau tim sarana prasarana untuk menangani ASPAK	Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan RSJD Atma Husada Mahakam dan Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSJD Atma Husada Mahakam dan Wakil Direktur Penunjang dan Pendidikan dan Penelitian RSJD Atma Husada Mahakam

NO.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	AKTIVITAS	SATUAN	KINERJA PERTAHUN			KINERJA TRIWULAN 3			ANGGARAN PERTAHUN			ANGGARAN TRIWULAN 3			FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA	PENANGGUNG JAWAB
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan yang Terintegrasi (Kegiatan)	Persentase Jumlah Modul Sistem Informasi Yang Terintegrasi	Mengidentifikasi kebutuhan integrasi, mengembangkan modul yang kompatibel, serta mengimplementasikan sistem untuk memastikan interoperabilitas data	%	100	70	70	75	70	93,333	Rp 5.791.520,00	Rp -	0	Rp 1.560.380,00	Rp -	0	Adanya tim SIMRS yang merumuskan beberapa aplikasi terintegrasi dirumah sakit	Tenaga programer yang kuantitasnya kurang dari kebutuhan	Mengusulkan kebutuhan tenaga programer, melibatkan pihak ketiga jika aplikasi yang dibutuhkan sangat urgent	Wakil Direktur Penunjang dan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian RSJD Atma Husada Mahakam
1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi yang berkualitas (Kegiatan)	Jumlah laporan diklat dan atau penelitian yang dilaksanakan	1. meningkatkan kualitas individu dalam dunia kerja melalui pendidikan, pelatihan, serta pembentukan karakter melalui kegiatan in house training 2. Memberikan Penyediaan Biaya Kontribusi Diklat/Bimtek untuk Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia yang berada di dalam maupun di luar daerah	Laporan	32	41	128,13	27	41	151,85	Rp 1.072.616.000,00	Rp 140.877.901,00	13,13	Rp 238.754.000,00	Rp 140.877.901,00	59,01	Adanya anggaran untuk kegiatan diklat external dan Internal	Anggaran yang terbatas dengan adanya efisiensi anggaran	Melakukan telaah dan analisa terkait jenis diklat yang urgent akan kebutuhan saja yang ditindaklanjuti	Wakil Direktur Penunjang dan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian RSJD Atma Husada Mahakam

TABEL 2.3 EVALUASI KINERJA SUB KEGIATAN RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM
TRIWULAN KE-3 TAHUN 2025

SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	JADWAL PELAKSANAAN				KINERJA PERTAHUN			KINERJA TRIWULAN 3			ANGGARAN PERTAHUN			ANGGARAN TRIWULAN 3			FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA	PENANGGUNG JAWAB
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25	26	27
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang dapat diandalkan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	1	1	1	2	5	4	80	3	4	133,33	72.790.000,00	21.365.000,00	29,35	21.000.000,00	21.365.000,00	101,74	1. Kerja keras untuk mencapai target yang telah ditetapkan 2. Disiplin dalam pengelolaan waktu, dan pekerjaan untuk mencapai target dan tujuan 3. Perencanaan yang baik untuk memberikan arah/tujuan dan target yang jelas 4. Kerjasama tim yang baik dan saling mendukung 5. Peran pimpinan yang efektif dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif dan meningkatkan produktivitas	Terdapat beberapa faktor penghambat dalam proses pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tetapi telah dapat diatasi dengan upaya yang efektif yang akan diuraikan dalam kolom Upaya	1. Meningkatkan koordinasi dengan tim kerja/rekan kerja dan konsultasi kepada atasan secara berjenjang ketika menemukan permasalahan dalam melaksanakan proses pencapaian kinerja 2. Menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku 3. Mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan segala upaya yang telah dilakukan dalam penyelesaian hambatan/permasalahan kerja untuk dijadikan dasar mengatasi permasalahan serupa di waktu mendatang	Kabag. Perencanaan Program dan Evaluasi
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Laporan	5	2	1	1	1	5	4	80	4	4	100	142.832.000,00	-	-	71.332.000,00	-	-	1. Kerja keras untuk mencapai target yang telah ditetapkan 2. Disiplin dalam pengelolaan waktu, dan pekerjaan untuk mencapai target dan tujuan 3. Perencanaan yang baik untuk memberikan arah dan tujuan dan target yang jelas 4. Kerjasama tim yang baik dan saling mendukung 5. Peran pimpinan yang efektif dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif dan meningkatkan produktivitas	Terdapat beberapa faktor penghambat dalam proses pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tetapi telah dapat diatasi dengan upaya yang efektif yang akan diuraikan dalam kolom Upaya	1. Meningkatkan koordinasi dengan tim kerja / rekan kerja dan konsultasi kepada atasan secara berjenjang ketika menemukan permasalahan dalam melaksanakan proses pencapaian kinerja 2. Menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku 3. Mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan segala upaya yang telah dilakukan dalam penyelesaian hambatan/permasalahan kerja untuk dijadikan dasar mengatasi permasalahan serupa di waktu mendatang	

SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	JADWAL PELAKSANAAN				KINERJA PERTAHUN			KINERJA TRIWULAN 3			ANGGARAN PERTAHUN			ANGGARAN TRIWULAN 3			FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA	PENANGGUNG JAWAB
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25	26	27
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran keuangan serta laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	380	380	380	380	380	380	378	99,47	380	378	99,47	65.364.628.593,00	17.572.639.902,00	26,88	19.710.826.168,00	17.572.639.902,00	89,15	1. Kerjasama tim yang baik dan saling mendukung 2. Peran pimpinan yang efektif dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif dan meningkatkan produktivitas 3. Serta Anggaran tersedia sesuai kebutuhan	Proses pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN tidak tepat waktu karena status UOBK	Meningkatkan Koordinasi dengan dinas kesehatan dan BPKAD terkait berkas dan proses pembayaran	Kabag. Keuangan dan Akuntansi
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Penatausahaan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	3	3	3	3	12	9	75	9	9	100	253.080.000,00	105.450.000,00	41,67	63.270.000,00	105.450.000,00	166,67	1. Kerjasama tim yang baik dan saling mendukung 2. Peran pimpinan yang efektif dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif dan meningkatkan produktivitas 3. Serta Anggaran tersedia sesuai kebutuhan	Proses pembayaran honorarium tepat waktu dan Tidak ada hambatan	Meningkatkan koordinasi dengan tim kerja / rekan kerja, dan konsultasi kepada atasan secara berjenjang ketika menemukan permasalahan dalam melaksanakan proses pembayaran Honorarium, sehingga Pembayaran dilakukan per bulan & tepat waktu	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sesuai dengan target yang ditetapkan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	1	1	1	1	4	3	75	3	3	100	87.950.000,00	60.697.960,00	69,01	22.100.000,00	60.697.960,00	274,65	1. klaim ditagihkan tepat waktu dan pembayaran masih dalam proses 2. Respon positif dari Kabupaten / Kota 3. Rekonsiliasi dilakukan bersama dan sesuai jadwal 4. laporan keuangan audited telah diselesaikan tepat waktu	1. Masih terdapat kasus klaim pending pasien JKN 2. Rasionalisasi anggaran berpotensi tidak terealisasi pembayaran tepat waktu 3. Masih terdapat nilai yg belum sinkron / sesuai 4. Posisi KAP diluar daerah, keterbatasan dalam koordinasi	1. Koordinasi dengan unit internal RS dan eksternal (BPJS) untuk penyelesaian klaim pending 2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait 3. koordinasi internal sebelum rekonsiliasi 4. Menyediakan data yang valid & koordinasi via virtual	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya bahan/barang/pelelitan rumah tangga dan peralatan kantor rumah sakit	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Paket	13	13	0	0	0	13	13	100	13	13	100	36.606.722,00	33.179.010,00	90,64	-	33.179.010,00	-	Koordinasi dengan bidang/loagian yang baik sehingga telah terlaksana sesuai jadwal	Tidak ada penghambat karena sudah terealisasi	Tetap berkoordinasi dengan Pimpinan dan meningkatkan kerjasama tim	

SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	JADWAL PELAKSANAAN				KINERJA PERTAHUN			KINERJA TRIWULAN 3			ANGGARAN PERTAHUN			ANGGARAN TRIWULAN 3			FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA	PENANGGUNG JAWAB
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25	26	27
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	0	7	0	0	7	7	100	7	7	100	57.200.502,00	51.994.620,00	90,90	-	51.994.620,00	-	Koordinasi dengan bidang/bagian sangat baik sehingga laporan kinerja triwulan dapat diselesaikan sesuai waktunya	Tidak ada faktor penghambat dalam pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor telah terlaksana sesuai waktu yang ditetapkan	Kabag. Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Paket Peralatan Rumah Tangga sesuai kebutuhan rumah sakit	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	Paket	13	13	0	0	0	13	11	84,615	13	11	84,615	218.596.640,00	92.374.815,00	42,26	-	92.374.815,00	-	Koordinasi dengan bidang/bagian sangat baik sehingga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dapat diselesaikan sesuai waktunya	Tidak ada faktor penghambat dalam pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga telah terlaksana sesuai waktu yang ditetapkan	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	35.346.600,00	-	-	-	-	-	Sesuai Verifikasi Anggaran bersama TIM TAPD dalam penetapan DPA Perubahan akan dilaksanakan pada Triwulan 4	Tidak ada penghambat dalam pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan karena akan dilaksanakan di Triwulan 4	1. Menunggu DPA Perubahan terbit 2. Tetap berkoordinasi dengan bidang/bagian agar pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dapat dilaksanakan sesuai waktunya	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	69	24	15	15	15	69	66	95,65	54	66	122,22	731.644.000,00	193.801.975,00	26,49	182.400.000,00	193.801.975,00	106,25	Anggaran pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD tersedia sesuai kebutuhan sehingga kegiatan terlaksana sesuai target yang telah ditentukan	Pemmasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan sub kegiatan ini adalah belanja harus melalui aplikasi E-Katalog dan Penyampaian laporan perjalanan dinas tidak tepat waktu	1. Menginformasikan tentang ketentuan belanja E-Katalog kepada seluruh unit terkait 2. Melakukan koordinasi dan memaksimalkan pelaporan perjalanan dinas melalui aplikasi SIDA	Kabag. Keuangan dan Akuntansi dan Kabag. Umum dan Kepegawaian
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sesuai kebutuhan dan regulasi yang berlaku	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ini Tidak dilaksanakan karena adanya efisiensi belanja	Dalam rangka melaksanakan Instruksi Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 yang sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 sehingga dilakukan efisiensi belanja	Sehingga upaya yang akan dilakukan adalah melakukan penyesuaian anggaran beserta indikatornya sesuai dengan regulasi yang berlaku, apabila mendapat persetujuan dari tim TAPD melalui APBD Perubahan tahun anggaran 2025	
Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	10	10	0	0	0	10	10	100	10	10	100	367.650.887,00	234.678.975,00	63,83	-	234.678.975,00	-	Koordinasi dengan bidang/bagian sangat baik sehingga Pengadaan Mebel dapat diselesaikan sesuai waktu	Tidak ada faktor penghambat dalam pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Mebel	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel telah terlaksana sesuai waktu yang ditetapkan	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya untuk menunjang pelayanan rumah sakit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	435	0	435	0	0	435	434	99,77	435	434	99,77	1.794.811.332,00	1.435.148.432,00	79,96	-	1.435.148.432,00	-	Koordinasi dengan bidang/bagian sangat baik sehingga sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dapat terlaksana dengan baik	Tidak ada faktor penghambat dalam pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tetap berkoordinasi dengan Pimpinan dan meningkatkan kerjasama tim	

SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	JADWAL PELAKSANAAN				KINERJA PERTAHUN			KINERJA TRIWULAN 3			ANGGARAN PERTAHUN			ANGGARAN TRIWULAN 3			FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA	PENANGGUNG JAWAB
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25	26	27
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat sesuai kebutuhan rumah sakit	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	0	0	0	1	1	100	1	1	100	7.500.000,00	-	-	-	-	-	Koordinasi dengan bidang/bagian sangat baik sehingga sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat telah terlaksana sejak triwulan I	Tidak ada penghambat karena Penyediaan Jasa Surat Menyurat sudah terealisasi 100 %	Tetap berkordinasi dengan Pimpinan dan meningkatkan kerjasama tim	Kabag. Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	Laporan	48	12	12	12	12	48	36	75	36	36	100	2.120.170.100,00	1.225.825.561,00	57,82	537.299.650,00	1.225.825.561,00	228,15	Koordinasi dan kerja sama yang baik dengan bidang atau bagian terkait sehingga pelaksanaan kegiatan dan ketersediaan anggaran dapat terlaksana sesuai kebutuhan	Tidak terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik, mengingat pembayaran dilakukan secara rutin setiap bulan sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan	Pelaksanaan pembayaran dilakukan tepat waktu	Kabag. Keuangan dan Akuntansi
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Laporan	10	2	3	3	2	14	9	64,286	8	9	112,5	8.144.921.744,00	5.677.471.520,00	69,71	1.859.942.546,40	5.677.471.520,00	305,25	Koordinasi dan kerja sama yang baik dengan bidang atau bagian terkait sehingga pelaksanaan kegiatan dan ketersediaan anggaran dapat terlaksana sesuai kebutuhan	Pelaksanaan kegiatan mengalami kendala berupa keterlambatan penyampaian dokumen tagihan oleh pihak penyedia, sehingga mempengaruhi kelancaran proses administrasi dan pembayaran	Melakukan konfirmasi kepada penyedia sebelum batas waktu pembayaran guna memastikan kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian dokumen tagihan	Kabag. Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sesuai kebutuhan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	0	0	0	1	1	100	1	1	100	42.319.999,00	975.000,00	2,30	7.500.000,00	975.000,00	13,00	Koordinasi dan kerja sama yang baik dengan bidang atau bagian terkait sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik	Tidak ada faktor penghambat yang signifikan dalam pelaksanaan sub kegiatan ini	Tetap berkordinasi dengan Pimpinan dan meningkatkan kerjasama tim	Kabag. Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sesuai kebutuhan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	26	16	10	0	0	26	15	57,692	26	15	57,692	522.688.500,00	142.848.072,00	27,33	-	142.848.072,00	-	Menjaga keselamatan dan meningkatkan performa kendaraan dan mencegah kerusakan lebih lama.	Tidak ada faktor penghambat yang signifikan dalam pelaksanaan sub kegiatan ini	Tetap berkordinasi dengan Pimpinan dan meningkatkan kerjasama tim	Kabag. Umum dan Kepegawaian

SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	JADWAL PELAKSANAAN				KINERJA PERTAHUN			KINERJA TRIWULAN 3			ANGGARAN PERTAHUN			ANGGARAN TRIWULAN 3			FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA	PENANGGUNG JAWAB
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25	26	27
Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD yang dapat dipertanggungjawabkan	Jumlah BLUD Yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit/Keja	15	15	15	15	15	15	15	100	15	15	100	23.000.000.000,00	5.499.173.686,00	23,91	5.703.424.600,00	5.499.173.686,00	96,42	Koordinasi dan kerja sama tim yang baik dengan bidang atau bagian terkait sehingga pelaksanaan kegiatan dan ketersediaan anggaran dapat terlaksana sesuai kebutuhan	Proses penyesuaian rekening belanja berdampak pada pergeseran anggaran BLUD	Melakukan koordinasi kepada unit dan instansi terkait	Kabag. Keuangan dan Akuntansi
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Fasilitas Kesehatan Lainnya sesuai perencanaan dan kebutuhan rumah sakit	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	10	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	148.536.000,00	-	-	-	-	-	Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya ini Tidak dapat dilaksanakan	Sesuai hasil asistensi anggaran tahun 2025, sub kegiatan ini diisi dengan kegiatan rapat koordinasi internal maupun eksternal RS berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan gedung baru RSUD Atma Husada Mahakam yang pada tahun 2025 dilakukan pembangunan Fisik (pembangunan yang pancang/struktur), tetapi setelah DPA di sahkan ada rapat koordinasi Perangkat Daerah dengan yang dipimpin oleh Sekda Prov Kaltim, dan menyatakan bahwa indikator yang ditetapkan didalam DPA tidak sesuai dengan ketetapan Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406 tahun 2024	Sehingga upaya yang akan dilakukan adalah melakukan penyesuaian anggaran beserta indikatornya sesuai dengan regulasi yang berlaku, apabila mendapat persetujuan dari tim TAPD melalui APBD Perubahan tahun anggaran 2025	Kabag. Perencanaan Program dan Evaluasi
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit sesuai dengan perencanaan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	2	1	0	1	0	2	2	100	2	2	100	485.359.080,00	112.906.425,00	23,26	282.639.080,00	112.906.425,00	39,95	1.Kerja keras untuk mencapai target yang telah ditetapkan 2.Disiplin dalam pengelolaan waktu, dan pekerjaan untuk mencapai target dan tujuan 3.Perencanaan yang baik untuk memberikan arah dan tujuan dan target yang jelas 4.Kerjasama tim yang baik dan saling mendukung 5.Peran pimpinan yang efektif dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif dan meningkatkan produktivitas	Tidak ada penghambat dalam Sub Kegiatan ini karena sudah terlaksana Pekerjaan Renovasi Mushola dan Pembayaran Limbah Setiap Bulannya	1.Meningkatkan koordinasi dengan tim kerja / rekan kerja dan konsultasi kepada atasan secara berjenjang ketika menemukan permasalahan dalam melaksanakan proses pencapaian kinerja 2.Menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku 3.Mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan segala upaya yang telah dilakukan dalam penyelesaian hambatan/permasalahan kerja untuk dijadikan dasar mengatasi permasalahan serupa diwaktu mendatang	
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Kebutuhan	Jumlah alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas kesehatan Yang Disediakan	Paket	37	0	0	37	0	37	27	72,973	37	27	72,973	1.587.834.474,00	435.933.049,00	27,45	-	435.933.049,00	-	Melakukan koordinasi dengan bidang atau bagian terkait pengadaan alat kesehatan yang akan dibelanjakan	Proses pengadaan masih berjalan	Tetap melakukan koordinasi terkait pengadaan belanja alat kesehatan dan alat penunjang guna memantau setiap tahapan dalam proses pengadaan tersebut	Kabid. Pelayanan Medis

SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	JADWAL PELAKSANAAN				KINERJA PERTAHUN			KINERJA TRIWULAN 3			ANGGARAN PERTAHUN			ANGGARAN TRIWULAN 3			FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA	PENANGGUNG JAWAB
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25	26	27
Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Tersedianya dan Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan dan sarana prasarana Kesehatan sesuai standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan kesehatan Yang Terpelihara Sesuai Standart	Unit	305	0	0	0	305	305	0	0	0	0	0	182.172.300,00	-	-	-	-	-	Melakukan koordinasi dengan tim terkait dalam pelaksanaan pemeliharaan alat kesehatan dan alat penunjang medik pada fasilitas layanan kesehatan, agar kegiatan tersebut terlaksana tepat waktu dan sesuai dengan standar yang ditetapkan	Kegiatan kalibrasi di lakukan 1 kali dalam satu tahun pada bulan Oktober dan akan direalisasikan sesuai masa expired alat kesehatan atau alat penunjang yang tersedia di Rumah Sakit	Selalu berkoordinasi dengan tim terkait pemeliharaan alat kesehatan atau alat penunjang agar kegiatan tersebut terlaksana tepat waktu sebelum masa expired	Kabid. Penunjang Non Medis
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan sesuai kebutuhan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	3	3	0	0	0	3	3	100	3	3	100	109.307.797,00	29.501.235,00	26,99	-	29.501.235,00	-	Koordinasi dan kerja sama yang baik dengan bidang atau bagian terkait sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana sesuai kebutuhan	Tidak ada faktor penghambat yang signifikan dalam pelaksanaan sub kegiatan ini karena sudah terealisasi sesuai waktu yang ditetapkan	Terus berkoordinasi dengan bidang terkait dan tim pengadaan	Kabid. Penunjang Medis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Sesuai Kebutuhan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen	4	1	0	2	1	4	2	50	3	2	66,667	416.838.000,00	79.591.155,00	19,09	52.210.000,00	79.591.155,00	152,44	Koordinasi dan kerja sama tim yang baik sehingga pelaksanaan kegiatan Dropping dan Expo dapat terlaksana sesuai jadwal	Tidak ada faktor penghambat yang signifikan dalam pelaksanaan sub kegiatan ini	Tetap berkoordinasi dengan tim terkait untuk mengetahui tahapan proses kegiatan yang masih berjalan	Kabid. Keperawatan dan Kabag. Umum dan Kepegawaian

SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	JADWAL PELAKSANAAN				KINERJA PERTAHUN			KINERJA TRIWULAN 3			ANGGARAN PERTAHUN			ANGGARAN TRIWULAN 3			FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA	PENANGGUNG JAWAB
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25	26	27
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terwujudnya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	4	1	1	1	1	4	3	75	3	3	100	5.791.520,00	-	-	1.560.380,00	-	-	Koordinasi dan kerja sama tim yang baik sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana	Tidak ada faktor penghambat yang signifikan dalam pelaksanaan sub kegiatan ini	Tim SIM RS membuat rencana pengembangan selanjutnya dengan selalu berkoordinasi dengan unit atau pihak terkait sesuai kebutuhan secara berkala. Serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan sebelumnya agar tidak ada perbaikan atau penubahan mendadak di kemudian hari yang dapat mengganggu timeline progress pengembangan yang telah terjadwal	Kabid. Penunjang Non Medis
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan yang berkualitas	Jumlah Sumber Daya Manusia Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	430	107	107	108	108	430	411	95,58	322	411	127,64	1.072.616.000,00	140.877.901,00	13,13	238.754.000,00	140.877.901,00	59,01	Adanya dukungan anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi SDM	Kurangnya tenaga pengajar yang terstandart dengan klasifikasi kelas A	Melakukan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) internal secara berkelanjutan dan melakukan pengembangan jaringan kerja sama eksternal untuk mendukung efektivitas pelaksanaan	Kabid Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian
Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Tersedianya Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah sakit Yang Disediakan	Unit	2410	2116	8	78	208	2410	1892	78,506	2202	1892	85,922	605.859.426,00	348.495.494,00	57,52	58.020.000,00	348.495.494,00	600,65	Melakukan koordinasi dengan bidang atau bagian terkait pengadaan Pengadaan Barang Penunjang yang akan dibelanjakan	Tidak ada kendala yang signifikan dalam pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit ini	Tetap berkoordinasi dengan tim pengadaan untuk mengetahui tahapan proses pengadaan	Kabid. Penunjang Non Medis
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya ini Tidak dapat dilaksanakan karena adanya efisiensi anggaran	Dalam rangka melaksanakan Instruksi Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 yang sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 sehingga dilakukan efisiensi belanja pada Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Belanja Pakaian Batik Tradisional dan Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH).	Menunggu DPA Perubahan terbit	Kabag. Umum dan Kepegawaian

TABEL 2.4 (T-C 29)

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2026 Provinsi Kalimantan Timur**

Nama SKPD : Rumah Sakit Jiwa Daerah atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN(OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD SAMPAI TAHUN 2029)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN N-3 (2023)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU n-2 (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN N- 1 (2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA SKPD TAHUN N-2 (2024)	REALISASI RENJA SKPD TAHUN N- 2 (2024)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN 2025 (TW III)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3		4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
					UOBK RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda										
1	02	02			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	Persen	100		93,73	100	106,7	100	100	100
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi SPA minimal 70%	Persen	91,93		94,8	91,81	96,85	91,83	92,72	100,86
1	02	02	1.01	02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	0		2	1	50	1	0	0
1	02	02	1.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Unit	4		3	3	100	4	2	50
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	165		2	2	100	37	30	18,18
1	02	02	1.01	16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	Unit	3,880		906	881	97,24	2.410	1892	48762,9
1	02	02	1.01	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas	Unit	479		345	345	100	469	33	6,89

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN(OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD SAMPAI TAHUN 2029)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN N-3 (2023)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU n-2 (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN N- 1 (2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA SKPD TAHUN N-2 (2024)	REALISASI RENJA SKPD TAHUN N- 2 (2024)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN 2025 (TW III)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3		4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
					Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar									
1	02	02	1.01	27	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan.	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	4		21	21	100	3	3	75
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase capaian jenis layanan berbasis kompetensi	Persen	100		-	-	0	28,57	0	0
1	02	02	1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen	4		5	5	100	4	2	50
1	02	02	1.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis	Orang	40		0	0	0	10	0	0
1	02	02	1.02	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	2		0	0	0	0	0	0
1	02	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	24		0	0	0	12	0	0
1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	2		0	0	0	0	0	0
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase penerapan system informasi kesehatan terintegrasi	Persen	100		100	100	100	16,67	0	0
1	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	4		4	4	100	4	3	75
1	02	03			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kapasitas SDM Bidang Kesehatan	Persentase	95,86		92,5	95,79	103,6	95,82	95,58	99,70790736
1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber daya Manusia Kesehatan	Persentase pemenuhan kebutuhan Sumber Daya	Persen	92,70		0	0	0	92,45	0	0

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN(OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD SAMPAI TAHUN 2029)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN N-3 (2023)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU n-2 (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN N- 1 (2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA SKPD TAHUN N-2 (2024)	REALISASI RENJA SKPD TAHUN N- 2 (2024)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN 2025 (TW III)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3		4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						Manusia Kesehatan (SDMK) sesuai standar Rumah Sakit									
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan SDM Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	308		0	0	0	308	0	0
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan minimal 20 JPL	Persen	100		0	0	0	100	0	0
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	302		349	349	100	302	411	136,09
1	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesejahteraan	Indeks	98,46		82	98,4	120	98,41	87,27	88,63
						Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	Persentase	100		100	100	100	100	100	100
1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan	Persen	100		100	100	100	100	80	80
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4		4	4	100	5	4	100
1	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5		5	5	100	5	4	80
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen/laporan keuangan dan akuntansi yang tepat waktu.	Persen	100		100	100	100	100	83,33	83,33
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	409		220	212	96,36	411	378	92,42

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN(OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD SAMPAI TAHUN 2029)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN N-3 (2023)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU n-2 (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN N- 1 (2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA SKPD TAHUN N-2 (2024)	REALISASI RENJA SKPD TAHUN N- 2 (2024)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN 2025 (TW III)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3		4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12		12	12	100	12	9	75
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	19		4	4	100	19	3	15,79
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Penunjang Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan Rumah Sakit	Persen	100				#DIV/0!	100	0	0
1	02	01	1.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1		0	0	0	3	0	0
1	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	108		0	0	0	108	0	0
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan	Persen	100		0	0	0	100	0	0
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	13		30	30	100	13	13	100
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7		15	15	100	7	7	100
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	14		15	15	100	14	12	85,71
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1		0	0	0	1	0	0
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	113		1	1	100	63	61	53,98

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN(OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD SAMPAI TAHUN 2029)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN N-3 (2023)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU n-2 (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN N- 1 (2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA SKPD TAHUN N-2 (2024)	REALISASI RENJA SKPD TAHUN N- 2 (2024)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN 2025 (TW III)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3		4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	15		0	0	0	11	0	0
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Persentase	100		100	100	100	100	0	0
1	02	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0		0	0	0	0	0	0
1	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	5		0	0	0	0	0	0
1	02	01	1.07	09	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	20		5	5	100	10	10	50
1	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	215		10	10	100	432	434	201,86
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Operasional Rumah Sakit	Persen	100		78,2	86,1	110,10	100	0	0
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1		2	2	100	1	1	100
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48		48	48	100	48	36	75
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3		27	27	100	2	9	300
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan	Persen	100		72,19	84,6	117,19	100	0	0
1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	Unit	2		1	1	100	1	1	50

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN(OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD SAMPAI TAHUN 2029)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN N-3 (2023)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU n-2 (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN N- 1 (2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA SKPD TAHUN N-2 (2024)	REALISASI RENJA SKPD TAHUN N- 2 (2024)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAHUN 2025 (TW III)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3		4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
					Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya									
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	34		26	26	100	27	15	44,12
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	82		0	0	0	123	0	0
1	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1		0	0	0	1	0	0
1	02	01	1.10		Peningkatan pelayanan BLUD	Persentase Realisasi Anggaran Pendapatan terhadap Target Proyeksi Pendapatan BLUD	Persen	100		100	100	100	100	91	91
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1		15	15	100	1	15	1500

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah pada Dinas Kesehatan. Berdasarkan peraturan tersebut Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam yang selanjutnya disingkat RSJD AHM adalah institusi pelayanan kesehatan jiwa perorangan yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat, dan pemulihan ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta pelayanan pendidikan. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan Paripurna, pendidikan dan penelitian sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Tugas pokok RSJD AHM adalah memberikan pelayanan kesehatan jiwa perorangan secara paripurna meliputi pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat, dan pemulihan ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta menyelenggarakan kegiatan Pendidikan dan penelitian. Pelayanan Kesehatan paripurna meliputi pelayanan Kesehatan:

1. Promotif;
2. Preventif;
3. Kuratif; dan
4. Rehabilitatif.

RSJD AHM memiliki otonom dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

2.2.1. Kajian Terhadap Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

RSJD Atma Husada Mahakam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pelayanan Kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika. Serta zat adiktif lainnya (NAPZA) yang digunakan sebagai analisis kinerja Pelayanan sebagai OPD. Analisis Kinerja Pelayanan OPD tersebut merujuk pada **IKK (Indikator Kinerja kunci)** sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Secara Nasional RSJD Atma Husada Mahakam memiliki **Indikator Nasional Mutu / INM** Pelayanan Kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam Permenkes Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta KMK No. HK.01.07/MENKES/1139/2022 tentang Panduan Teknisnya yang terdiri dari 13 indikator dimana 10 indikator dilaksanakan pada RSJD Atma Husada Mahakam. Dan **SPM/Standar Nasional** mutu pelayanan rumah sakit yang harus dipenuhi yang terdiri dari 17 Pelayanan penilaian dimana indikator tersebut merupakan indikator Program RSJD Atma Husada Mahakam.

Secara lengkap rekapitulasi Analisis Kinerja Pelayanan RSJD Atma Husada Mahakam disajikan dalam Tabel 2.2 (T-C.30) di bawah ini.

TABEL 2.5 (T-C 30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Capaian Analisis
				Tahun N-2 (2024)	Tahun N-1 (2025)	Tahun N (2026)	Tahun N+1 (2027)	Tahun N-2 (2024)	Tahun N-1 (TW 1 2025)	Tahun N (2026)	Tahun N+1 (2027)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Persentase capaian nilai indikator nasional mutu	Standar Nasional		96,26	96,30	96,35	96,40	95,23	99,8	96,35	96,40	Capaian realisasi Meningkat secara progresif (<i>upward trend</i>)
2	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	SPM		100	100	100	100	100	100	100	100	Capaian realisasi selalu optimal dan konsisten (<i>full achievement</i>)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD

Untuk menjalankan perannya sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam yang selanjutnya disingkat RSJD AHM memiliki tugas, fungsi dan struktur organisasi yang telah ditetapkan dalam sebuah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Pada Dinas Kesehatan.

Tugas pokok RSJD AHM adalah memberikan pelayanan kesehatan jiwa perorangan secara paripurna meliputi pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat, dan pemulihan ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta menyelenggarakan kegiatan Pendidikan dan penelitian. Pelayanan Kesehatan paripurna meliputi pelayanan Kesehatan:

- a. Promotif;
- b. Preventif;
- c. Kuratif; dan
- d. Rehabilitatif.

RSJD AHM memiliki otonom dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

2.3.1. Permasalahan Dan Hambatan

Untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa di RSJD Atma Husada Mahakam, maka organisasi perlu menetapkan tujuan dan sasaran strategis organisasi secara tepat. Agar tujuan dan sasaran strategis dapat dirumuskan secara tepat, diperlukan analisis lingkungan strategis baik yang sifatnya internal dan eksternal. Berikut ini adalah beberapa permasalahan atau hambatan strategis yang telah diidentifikasi, sebagai berikut:

- 1) Permasalahan Internal :
 - a. Komposisi tempat tidur RSJD Atma Husada Mahakam belum sesuai dengan PP dan Permenkes terkait

penyelenggaraan bidang perumahsakitan dan klasifikasi RS.

- b. Utilisasi layanan Napza menurun padahal jumlah penyalahguna Napza meningkat dari tahun ke tahun.
- c. RS belum memiliki beberapa jenis tenaga subspesialis kesehatan jiwa komunitas dan subspesialis adiksi.
- d. Jumlah SDM tertentu masih kurang, misalnya spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi (1 orang, part-time) dan kedokteran jiwa subspesialis anak & remaja (2 orang, part-time)
- e. Fasilitas pendaftaran online belum dimanfaatkan secara optimal.
- f. Kunjungan pasien umum masih rendah, karena brand RSJD belum dikenal oleh Masyarakat secara luas dalam memberikan pelayanan kesehatan non-jiwa.
- g. Masih banyak kasus unspecified organic or symptomatic mental disorder yang tidak bisa ditangani padahal RSJD Atma Husada adalah RS Khusus Jiwa Kelas A.
- h. Masih memerlukan banyak kegiatan peningkatan kompetensi secara keseluruhan.
- i. Sistem informasi belum terintegrasikan antar-layanan didalam rumah sakit, maupun dengan SatuSehat.
- j. Sistem pendokumentasian data masih lemah, database belum terbangun dengan baik, misalnya belum dapat dipisahkan antara data farmasi rawat jalan dengan rawat inap, dll, sehingga belum dapat digunakan untuk kebutuhan analisis dan perencanaan.
- k. Kunjungan pasien pada beberapa jenis layanan yang merupakan core-business RSJD Atma Husada (misalnya klinik psikologi, klinik anak dan remaja, klinik psikiatri geriatri, unit intensif psikiatri dan unit intermediate NAPZA, tes narkoba, serta rehabilitasi psikososial) masih fluktuatif.

1. Pendapatan operasional belum mampu menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa di RSJD Atma Husada Mahakam, sehingga masih sangat tergantung pada subsidi Pemprov.
- 2) Permasalahan Eksternal :
 - a. Dinamika kebijakan dan regulasi yang cukup sering di bidang perumahsakitan dan di bidang kelembagaan pemerintah daerah yang cukup sering berubah sehingga RSJD Atma Husada Mahakam harus selalu berupaya mengikuti dan memperbarui kebijakan internal.
 - b. Kasus kesehatan mental dan kesehatan jiwa terus meningkat, yang belum diimbangi dengan dukungan sumber daya dan kebijakan secara penuh oleh pemangku kebijakan.
 - c. Sistem rujukan berjenjang menjadi tantangan bagi RSJD Atma Husada Mahakam untuk mengembangkan layanan dengan tingkat severitas kasus tinggi, karena kasus sederhana sudah diselesaikan di rumah sakit rujukan bawah.
 - d. Tarif JKN untuk pelayanan non-kekhususan mengikuti tarif rumah sakit kelas dibawahnya, tantangan bagi RSJD Atma Husada Mahakam untuk mengembangkan pangsa pasar non-JKN.
 - e. Kasus penyalahgunaan narkoba di Provinsi Kaltim terus meningkat, sedangkan pasien NAPZA yang menjadi peserta BPJS hanya bisa dirawat di rumah sakit khusus jiwa sebagai pasien PBI.
 - f. Tarif JKN belum menutupi biaya penanganan kesehatan tambahan untuk pasien gangguan jiwa, misalnya scalling dan tindakan gigi lainnya.

2.3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025-2029 karena Dinas Kesehatan sebagai Organisasi Induk dari Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) RSJD Atma Husada Mahakam adalah merupakan unsur dari pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan mengacu dan mendukung tujuan yang kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025-2030 yaitu “Terbangunnya Generasi Emas” dan sasaran yang kelima yaitu “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat”

Dalam mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan, maka Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur merumuskan Tujuan: *Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.*

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran strategis Dinas Kesehatan berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut:

- Tujuan 1 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
- Sasaran 1 : Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan sesuai standar
- Sasaran 2 : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

2.3.3. Dampaknya terhadap capaian program nasional /internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)

Perencanaan kegiatan dalam dokumen Renja dirancang secara strategis untuk tidak hanya memenuhi target internal, tetapi juga secara langsung memberikan kontribusi nyata

terhadap pencapaian indikator kinerja nasional dan global. Berdasarkan data terakhir dari Kementerian Kesehatan, rata-rata capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sektor kesehatan di tingkat kabupaten/kota pada 2023 mencapai 82%, dengan 24 dari 38 provinsi berhasil mencapai 100% capaian indikator krisis kesehatan, dan 30 provinsi mencapai 100% untuk indikator kejadian luar biasa. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kegiatan Renja dapat mendukung peningkatan akses dan mutu layanan dasar secara signifikan.

Selaras dengan itu, dalam konteks *Sustainable Development Goals* (SDGs), laporan *Sustainable Development Report 2024* menempatkan Indonesia pada peringkat ke-77 dari 167 negara dengan skor 70,2, mencerminkan kemajuan sedang namun masih ada tantangan dalam beberapa tujuan pembangunan. Dukungan Renja diharapkan meningkatkan kontribusi terhadap indikator kesehatan (SDG-3), pendidikan (SDG-4), dan pengentasan kemiskinan (SDG-1), melalui target-target terukur seperti peningkatan cakupan imunisasi, penurunan mobilitas kemiskinan, dan penurunan angka kematian ibu-bayi.

Selain itu, pelaksanaan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) ditujukan untuk menjamin mutu layanan sesuai regulasi nasional, sementara SPM memastikan tersedianya layanan dasar minimal. Dengan capaian SPM nasional yang terus meningkat, Renja turut memperkuat fondasi NSPK dan mendorong sinergi antar-lembaga. Transformasi kegiatan ini secara sistematis akan memperbaiki akses, mutu, dan akuntabilitas layanan, serta memperkuat kontribusi pemerintah daerah terhadap target-target SDGs hingga tahun 2030. Adapun tantangan dan peluang yang akan dihadapi oleh RSJD Atma Husada Mahakam diantaranya:

2.3.3.1. Tantangan

Terdapat beberapa tantangan penting kedepan yang perlu diperhatikan oleh pihak RSJD Atma Husada Mahakam, antara lain:

- Stigma Rumah Sakit Jiwa di masyarakat yang negatif.
- Pertumbuhan Rumah Sakit pesaing (sebagai pemberi pelayanan dan pemberi pelatihan terakreditasi).
- Keterbatasan tenaga sub spesialis di Kalimantan Timur untuk memenuhi kebutuhan 24 Jenis Layanan berbasis kompetensi.
- Tuntutan / ekspektasi masyarakat yang tinggi akan layanan kesehatan.
- Sistem Rujukan Terpadu yang belum berjalan dengan baik. Sistem rujukan berjenjang menjadi tantangan dalam mengembangkan layanan dengan tingkat severitas kasus tinggi, karena kasus sederhana sudah diselesaikan di rumah sakit rujukan bawah.
- Pasien NAPZA yang menjadi peserta BPJS hanya bisa sebagai kepesertaan PBI.
- Dinamika kebijakan dan regulasi pembiayaan BPJS yang semakin ketat.
- Perubahan Regulasi di bidang Kesehatan yang sangat dinamis.
- Perubahan tarif/kebijakan BPJS dapat mengganggu *sustainability* pendapatan.
- Ketidakseimbangan finansial, kenaikan biaya operasional tidak sejalan dengan peningkatan sumber pendapatan.
- Perkembangan teknologi dan digitalisasi layanan.
- stigma terhadap ODGJ yang bisa menghambat partisipasi dan efektivitas pelatihan.
- persaingan dengan lembaga institusi penyelenggara pelatihan , yang menawarkan program yang lebih fleksibel dan digital.
- perubahan kebijakan anggaran atau prioritas daerah , yang bisa mengurangi dukungan terhadap program diklat.
- resiko burnout pada tenaga pelatih akibat beban kerja tinggi.

2.3.3.2. Peluang

- Ditetapkannya UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang memberi berbagai peluang.
- bagi RSJD Atma Husada Mahakam antara lain menyelenggarakan pendidikan berbasis rumah sakit (hospital-based), hingga inovasi pelayanan kesehatan tradisional.
- Komitmen Pendanaan (Subsidi) dari Pemerintah berupa dana APBD Provinsi.
- Kebijakan 24 Layanan berbasis Kompetensi berpeluang untuk meningkatkan pendapatan Rumah Sakit.
- Ditetapkannya IKN sebagai Ibukota Negara.
- Terdapat Institusi Pendidikan Kesehatan yang bekerja sama dengan RSJD AHM.
- Kebijakan Universal Health Coverage (UHC).
- Kebijakan pemberian beasiswa kepada SDM K .
- Jumlah penduduk yang meningkat, angka kemiskinan dan adanya perubahan pola penyakit.
- Adanya kerjasama dengan Instansi Pemerintah / Swasta untuk tes kesehatan jiwa untuk calon karyawan instansi pemerintah, militer, maupun swasta selalu ada.
- Adanya peluang kerjasama pengelolaan fasilitas dan pelayanan di RSJD dengan pihak-pihak swasta
- Diversifikasi pendapatan dari kerjasama dan pemanfaatan aset.
- Perkembangan sistem keuangan dan pembayaran melalui platform digital.
- Kerjasama dan jejaring layanan kesehatan dengan corporate dan asuransi non BPJS.
- meningkatnya prevalensi ODGJ, menciptakan kebutuhan pelatihan yang lebih luas.
- adanya kemitraan antara BPSDM Prov Kalimantan Timur dan RSJD Atma Husada Mahakam dalam Penyelenggaraan Diklat.

- sebagai RS pengampu RSUD di kabupaten/kota dalam hal pelayanan kesehatan jiwa.

2.3.4. Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Yang Strategis Untuk Ditindak Lanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Dalam Tahun Yang Direncanakan.

Isu-isu strategis merupakan permasalahan yang mendasar dan terjadi di rumah sakit serta perlu diperhatikan dalam rangka penyusunan rencana strategis RSJD Atma Husada Mahakam. Beberapa masalah utama akan menjadi faktor penghambat pencapaian tujuan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam, disisi lain masalah utama tersebut akan memberikan dampak secara positif atau sebagai faktor pendorong. Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sampai dengan saat ini meliputi beberapa aspek diantaranya yaitu:

2.3.4.1. Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN)

Dalam rangka mengurangi dampak ekonomi akibat padatnya penduduk terkhusus Pulau Jawa, Indonesia kini menanggulangnya dengan cara memindahkan Ibu kota Negara baru di luar Pulau Jawa, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Alasannya adalah karena resiko bencana yang minim, kawasan tersebut juga dinilai cukup strategis diantara kota-kota yang berkembang, yakni kota Balikpapan dan Samarinda. Dalam rencana pemindahan ibukota ini, diproyeksikan dapat menumbuhkan berbagai sektor di wilayah Kalimantan Timur.

Pemerintah mengemukakan alasan utama dari pemindahan IKN ke luar Pulau Jawa adalah pemerataan ekonomi. Aktivitas pemerintahan dan bisnis yang berpusat di Pulau Jawa khususnya DKI Jakarta, telah menghambat pertumbuhan pusat-

pusat perekonomian baru di luar Pulau Jawa. Disisi lain ada beberapa resiko dari pemindahan IKN ke luar Pulau Jawa. Risiko terutama terkait dengan kesiapan daerah tujuan dalam aspek infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

Disisi lain, yang harus diperhatikan adalah penyebaran tenaga kerja yang terlibat dalam pembangunan proyek perpindahan IKN, yang menurut datanya 56% merupakan penduduk Pulau Jawa. Tenaga kerja yang berpindah ke wilayah IKN baru tentunya akan melakukan adaptasi atau penyesuaian dengan lingkungan baru, sosial budaya yang baru, dan karakteristik alam yang baru pula. Kondisi ini dapat menyebabkan munculnya gejala stres yang apabila berkelanjutan dan tidak mendapatkan penanganan yang cukup dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan mentalnya.

Selain itu dampak lain yang harus mendapat perhatian dan perlu diantisipasi adalah kebakaran hutan, banjir dan longsor merupakan bahaya yang perlu dijadikan dasar pertimbangan dalam perencanaan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Adanya kekhawatiran mengenai potensi terpinggirnya masyarakat lokal menuntut adanya perencanaan yang lebih serius dari pemerintah pusat untuk mengantisipasi dampak sosial apabila wacana pemindahan ibu kota negara benar-benar terwujud.

Kondisi tersebut dapat menjadi stressor bagi masyarakat lokal yang terdampak dan berisiko tinggi untuk mengalami ketegangan psikologis yang jika berkelanjutan dapat mengganggu kesehatan

mentalnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka isu strategis yang dapat dirumuskan adalah **Potensi meningkatnya angka gangguan jiwa sebagai dampak pemindahan IKN.**

2.3.4.2. Tingkat Kemiskinan Kaltim

Sesuai data yang disampaikan oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam kegiatan rapat dengan agenda Kick Off Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025 - 2029 pada tanggal 5 Januari 2023 disampaikan bahwa tingkat kemiskinan Kaltim lebih baik dari Nasional akan tetapi terdapat 4 Kabupaten/Kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Kaltim yaitu Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Kutai Timur. Tren tingkat kemiskinan di provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2018 fluktuatif dengan kecenderungan **meningkat.**

Kemiskinan sangat dekat dengan gangguan kesehatan mental. Bukan hanya stres dan depresi, kondisi ini juga bisa menyebabkan seseorang mengalami trauma dan gangguan cemas. Menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Ketika kesehatan mental terjaga dengan baik, maka tubuh pun dapat akan berfungsi dengan baik. Selain itu, kesehatan mental yang optimal bisa meningkatkan kualitas hidup seseorang.

Ada berbagai hal yang bisa mengganggu kondisi kesehatan mental, mulai dari kondisi lingkungan hingga ekonomi dan ternyata ada berbagai dampak dari kemiskinan pada kesehatan mental. seseorang yang mengalami kemiskinan berisiko dua kali lebih

besar mengidap depresi dibandingkan mereka yang tidak mengalami masalah ekonomi. Hal ini terjadi karena kemiskinan dapat membebani kesehatan fisik maupun mental.

Tidak sedikit orang yang mengalami masalah ekonomi harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhannya. Kondisi ini bisa memicu tekanan pada mental sehingga orang tersebut mengalami stres. Tingkat stres yang tidak dikelola dengan baik dapat memicu depresi yang mengganggu kesehatan mental seseorang. Dengan demikian dapat dirumuskan permasalahan adalah **meningkatnya angka gangguan jiwa sebagai dampak tingkat kemiskinan di Kaltim**

2.3.4.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim

Sesuai data yang disampaikan oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam kegiatan rapat dengan agenda Kick Off Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 pada tanggal 5 Januari 2023 disampaikan bahwa IPM Kaltim berada diatas Nasional namun terdapat 3 kabupaten/kota dengan IPM terendah Kaltim yaitu Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Kutai Barat. Adapun tren IPM Kaltim sejak tahun 2018 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat

Sebagian besar ODGJ mengalami penurunan kesehatan secara fisik yang akhirnya menurunkan produktivitas, baik dalam bekerja maupun dalam beraktivitas sehari-hari. Secara keseluruhan gangguan Kesehatan Jiwa mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dan

meningkatkan beban dana sosial untuk kesehatan masyarakat.

2.3.4.4. Aspek Sosial

Stigma dari masyarakat yang masih negatif terhadap masalah kesehatan jiwa memberikan dampak yang kurang baik untuk pelayanan kesehatan jiwa bagi ODMK. Masih banyaknya keluarga pasien yang kurang peduli terhadap ODMK dimana hal ini dapat dilihat dengan masih adanya pasien yang tidak dapat dipulangkan karena adanya penolakan keluarga dan masyarakat di tempat tinggal pasien atau pasien yang memang keberadaan keluarganya belum diketahui (pasien gelandangan psikotik).

Data pasien yang tidak dapat dipulangkan saat ini di RSJD Atma Husada Mahakam sebanyak 26 pasien. Selain itu juga masih adanya beberapa pasien yang dirawat di RSJD Atma Husada Mahakam yang tidak pernah dikunjungi oleh keluarga walaupun keluarga bertempat tinggal di Samarinda.

Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan jiwa. Selain itu juga masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Timur. Berdasarkan analisis penentuan isu-isu strategis di RSJD Atma Husada Mahakam, maka masalah yang dapat dirumuskan yaitu **Tingginya stigma masyarakat terhadap ODMK.**

2.3.4.5. Aspek Teknologi

Dalam lingkup kesehatan, keselamatan pasien harus menjadi target nomor satu. Untuk itu kualitas pelayanan pada pasien selalu menjadi prioritas utama di berbagai fasilitas kesehatan, seperti rumah

sakit, klinik kesehatan maupun puskesmas. Dalam wilayah lingkup kesehatan ini, teknologi informasi kerap menjadi sorotan dan kini mengingat pentingnya peranan teknologi di segala segi kehidupan, maka teknologi rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan pasien semakin digalakkan.

Teknologi rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan pasien begitu penting. Salah satunya adalah teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi di rumah sakit bisa menghemat tempat maupun ruang lingkup pekerjaan para petugas medis. Petugas tidak perlu lagi mencatat di kertas/buku dan menyimpannya dalam bentuk dokumen offline. Dengan adanya sistem komputerisasi, maka data para pasien bisa tersimpan dengan aman di komputer.

Sistem komputerisasi di rumah sakit membuat pelayanan pada pasien menjadi lebih cepat. Petugas tidak perlu repot mencari data-data pasien satu-persatu dari buku atau dokumen tertulis lainnya, namun cukup membuka data pasien di komputer. Data yang dimaksud akan mudah dicari dengan cara mengetikkan keyword pada kolom pencarian maka data akan muncul secara otomatis. Data-data pasien juga lebih mudah ditelusuri atau dicek secara lebih terperinci sehingga meminimalisir human error. Petugas juga lebih mudah ketika perlu melakukan perubahan data pada pasien

Salah satu manfaat teknologi rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan pasien adalah mempermudah komunikasi antar petugas medis. Petugas medis tidak perlu repot memberikan suatu

dokumen milik pasien ke petugas lainnya ketika dokumen tersebut dibutuhkan namun para petugas cukup akses data di komputer. Kareena seluruh sistem informasi di rumah sakit bisa dilihat dan diakses oleh seluruh petugas medis kapan pun.

Rekam kesehatan elektronik merupakan dokumen yang sangat penting. Dokumen tersebut berisi tentang profil kesehatan pribadi milik pasien yang menggambarkan riwayat medis pasien serta catatan perkembangan kesehatan seumur hidup pasien. Termasuk di dalamnya adalah demografi pasien, permasalahan fisik dan psikis, imunisasi, data laboratorium, obat-obatan, tanda-tanda vital, laporan radiologi dan data lainnya.

RSJD Atma Husada Mahakam telah memiliki Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) yang mulai dibangun pada tahun 2017 dan terus dilakukan pengembangan/ updating sesuai dengan kebutuhan hingga saat ini. Permasalahan yang masih dirasakan terkait pemanfaatan teknologi informasi pada RSJD Atma Husada Mahakam adalah:

1. RSJD Atma Husada Mahakam telah membangun beberapa aplikasi untuk memudahkan proses pelayanan tetapi pemanfaatannya oleh masyarakat belum maksimal, misalnya rumah sakit telah membuat sistem pendaftaran secara online tetapi masyarakat belum memanfaatkan sistem tersebut walaupun telah dilakukan sosialisasi.
2. Kondisi SIMRS saat ini masih perlu dilakukan *updating* terhadap fitur-fitur di dalamnya agar dapat dimanfaatkan secara lebih optimal baik

- oleh petugas rumah sakit maupun konsumen dari masyarakat. Salah satunya adalah dengan mentransformasi dokumen rekam medik menjadi dokumen digital dan lain-lain
3. Untuk kondisi ini permasalahan yang dapat dirumuskan adalah belum **optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan di RSJD Atma Husada Mahakam oleh petugas maupun masyarakat sebagai konsumen.**

2.3.4.6. Aspek Budaya Kerja

Budaya kerja merupakan sistem nilai, persepsi, perilaku dan keyakinan yang dianut oleh tiap individu karyawan dan kelompok karyawan tentang makna kerja dan refleksinya dalam kegiatan mencapai tujuan organisasi dan individual. Budaya kerja diturunkan dari budaya organisasi. Budaya organisasi itu sendiri merupakan sistem nilai yang mengandung cita-cita organisasi sebagai sistem internal dan sistem eksternal sosial.

Sesuai dengan surat Edaran Kementerian PAN & RB No.20 Tahun 2021 Tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara dengan budaya kerja organisasi BerAKHLAK dan bangga membangun bangsa maka Rumah sakit khusus jiwa Daerah Atma Husada Mahakam menjadikan sebagai Budaya kerja. Kegiatan dalam membangun budaya kerja tersebut yang telah dilaksanakan adalah sosialisasi kepada seluruh staff RS sekaligus melaksanakan pencaanangan di tahun 2022.

Dalam rangka lebih memperkuat Budaya kerja ber AKHLAK tersebut maka dituangkan di dalam

Tata Kelola RS (Hospital By Law). Tentunya dengan serangkaian kegiatan dalam mengimplementasikan budaya kerja ber AKHLAK tersebut belum optimal seperti yang diharapkan maka perlu terus menerus dibangun.

Sebagai instansi yang memberikan pelayanan RSJD Atma Husada Mahakam harus mempunyai standar yang dapat memberikan kepastian mutu. layanan. Penjagaan mutu layanan harus dilakukan terus menerus untuk diperbaiki dan berkesinambungan. Selain untuk memberikan kepastian mutu layanan maka dalam upaya mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

2.3.4.7. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya manusia (SDM) kesehatan adalah semua orang yang bekerja secara aktif dan profesional dibidang kesehatan. Tujuan adanya manajemen SDM di suatu instansi adalah tersedianya tenaga kesehatan yang bermutu dan memadai terdistribusi secara adil, serta termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Perencanaan tenaga kesehatan adalah upaya penetapan jenis, jumlah, dan kualifikasi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan. Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan adalah upaya pengadaan tenaga kesehatan sesuai dengan jenis, jumlah dan kualitasnya yang telah direncanakan serta

peningkatan kemampuan atau kompetensi SDM kesehatan sesuai dengan kebutuhan instansi.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit bahwa RS harus menyiapkan tenaga Kesehatan secara jumlah dan jenis harus memenuhi ketentuan. Dalam pelaksanaannya pengembangan SDM harus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan pendidikan. Permasalahan yang terjadi di RS selain jumlah dan jenis yang belum memenuhi maka yang perlu menjadi perhatian adalah Diklat dengan standar 20 jam per orang per tahun.

2.3.4.8. Aksesibilitas yang rendah terhadap pusat-pusat pelayanan kesehatan jiwa.

Berdasarkan data dari Kementrian Kesehatan RI menunjukkan angka gangguan kesehatan jiwa dialami oleh 1 dari 10 orang Indonesia. Peningkatan layanan kesehatan mental dan pengurangan stigma terhadap penderita menjadi langkah penting dalam penanganannya.

Meningkatnya masalah kesehatan jiwa memberikan dampak terhadap kebutuhan akan pelayanan kesehatan jiwa yang juga semakin meningkat. Jangkauan pelayanan kesehatan jiwa harus dapat mencapai masyarakat yang tinggal di pelosok daerah dan bukan hanya yang berada di kota saja. Hal ini merupakan salah satu upaya dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan jiwa. Upaya ini tidak mungkin bisa dilaksanakan jika pelayanan kesehatan jiwa hanya diberikan oleh pihak RSJD Atma Husada Mahakam saja.

Berdasarkan piramida pemberi pelayanan kesehatan jiwa seharusnya semua pihak terlibat dalam pemberian pelayanan kesehatan jiwa, baik formal dan non formal dan berasal dari instansi pemerintah maupun swasta. Pelayanan kesehatan jiwa yang memadai yang dapat menjangkau seluruh masyarakat belum dapat dilaksanakan disebabkan oleh jumlah tenaga kesehatan jiwa masih sangat terbatas.

Masalah kesehatan jiwa sering kali bermanifestasi dalam bentuk keluhan fisik, sehingga tidak terdeteksi dan tidak teratasi dengan baik. Pemahaman masyarakat tentang kesehatan jiwa masih kurang dan stigma terhadap gangguan jiwa masih besar, sehingga mereka tidak datang ke pelayanan kesehatan jiwa, tapi banyak yang pergi ke pengobatan tradisional atau pemuka agama.

Penduduk pedesaan (rural) sulit menjangkau fasilitas kesehatan jiwa dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Adanya otonomi daerah yang membuat daerah menjadi penentu kebutuhan masing-masing, menyebabkan masalah pelayanan kesehatan jiwa belum tentu dianggap sebagai kebutuhan prioritas.

Berdasarkan uraian tersebut, maka isu strategis yang dirumuskan adalah **Rendahnya aksesibilitas terhadap pusat-pusat pelayanan kesehatan jiwa.**

2.4 Review Terhadap Rencana RKPD

Dari Renja yang telah disusun pada RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja rumah sakit. Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Renja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur.

Disamping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur.

Renja RSJD Atma Husada Mahakam tahun 2026 telah disusun dan sebelum ditetapkan menjadi dokumen Renja, perlu dilakukan review terhadap RKPD Provinsi Kalimantan Timur dan telah sesuai dengan RKPD dengan 2 nomenklatur program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

TABEL 2.6 (T-C 31)
REVIEW TERHADAP RENJA RKPD TAHUN 2026
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No	Renja RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %	101.889.457.000,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %	101.889.457.000,00	
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	98,42 Indeks				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	98,42 Indeks		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Penyediaan Gaji dan pelaksanaan penatausahaan keuangan tepat Waktu (RSJD Atma Husada Mahakam)	100%	70.408.259.985,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Penyediaan Gaji dan pelaksanaan penatausahaan keuangan tepat Waktu (RSJD Atma Husada Mahakam)	100%	70.408.259.985,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	410 Orang/ Bulan	70.155.179.985	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	410 Orang/ Bulan	70.155.179.985	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	253.080.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	253.080.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase Nilai Survei kepuasan pegawai terhadap kenyamanan ditempat kerja (RSJD	86,12 %	7.036.927.815,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase Nilai Survei kepuasan pegawai terhadap kenyamanan ditempat kerja (RSJD	86,12 %	7.036.927.815,00	

No	Renja RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Atma Husada Mahakam)					Atma Husada Mahakam)			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	2.023.006.015	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	2.023.006.015	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	5.013.921.800,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	5.013.921.800,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Samarinda	Persentase Kendaraan Dinas Pada RSJD AHM Yang Berfungsi Dengan Baik	85,73 %	444.269.200,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Samarinda	Persentase Kendaraan Dinas Pada RSJD AHM Yang Berfungsi Dengan Baik	85,73 %	444.269.200,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	42.320.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	42.320.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	401.949.200,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	401.949.200,00	

No	Renja RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Operasional atau Lapangan					Operasional atau Lapangan					
	Peningkatan pelayanan BLUD	Samarinda	Persentase pendapatan hasil pelayanan terhadap target BLUD (RSJD Atma Husada Mahakam)	100 %	24.000.000.000	Peningkatan pelayanan BLUD	Samarinda	Persentase pendapatan hasil pelayanan terhadap target BLUD (RSJD Atma Husada Mahakam)	100 %	24.000.000.000	
	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Samarinda	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	24.000.000.000	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Samarinda	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	24.000.000.000	
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Samarinda	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	100%	1.062.189.000,00	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Samarinda	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	100%	1.062.189.000,00	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	Nilai Aspak	91,85 %	905.389.000,00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	Nilai Aspak	91,85 %	905.389.000,00	
	Pengadaan barang penunjang	Samarinda	Jumlah Barang Penunjang Operasional	512 Unit	341.914.200,00	Pengadaan barang penunjang	Samarinda	Jumlah Barang Penunjang Operasional	512 Unit	341.914.200,00	

No	Renja RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	operasional Rumah Sakit		Rumah Sakit yang Disediakan			operasional Rumah Sakit		Rumah Sakit yang Disediakan			
	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Samarinda	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	574 Unit	415.841.900,00	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Samarinda	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	574 Unit	415.841.900,00	
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Samarinda	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	147.632.900,00	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Samarinda	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	147.632.900,00	
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	Persentase capaian jenis layanan yang tersedia	100 %	156.800.000,00	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	Persentase capaian jenis layanan yang tersedia	100 %	156.800.000,00	
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	156.800.000,00	Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	156.800.000,00	
TOTAL					102.951.646.000,00	TOTAL					102.951.646.000,00

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Renja UOBK RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 merupakan Rencana Kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan tahun 2025-2029. Rencana Kerja RSJD Atma Husada Mahakam tahun 2026 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara pembangunan jangka panjang dan menengah daerah, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, RSJD Atma Husada Mahakam dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, RSJD Atma Husada Mahakam dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan kesehatan jiwa.

Sesuai dengan isu-isu strategis yang di dapat pada RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur, maka perlu disusun langkah-langkah berupa program dan kegiatan yang dapat membantu mengatasi semua permasalahan atau isu-isu yang ada. Selain dengan menginventarisir semua kebutuhan yang diperlukan dari pemangku kepentingan guna mengatasi permasalahan yang timbul, RSJD Atma Husada Mahakam juga menampung aspirasi atau keluhan dari masyarakat pengunjung rumah sakit sebagai bahan masukan untuk rencana program dan kegiatan.

Tabel 2.7 (T-C 32)

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2026 Provinsi Kalimantan Timur**

Nama Perangkat Daerah : RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur

No.	Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	98,42 Indeks	
			Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100%	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Penyediaan gaji dan pelaksanaan penatausahaan keuangan tepat waktu	100 %	
1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	410 Orang/Bulan	
1.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Samarinda	Persentase Nilai survei kepuasan pegawai terhadap kenyamanan ditempat kerja	86,12 %	
2.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	
2.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase Kendaraan Dinas Pada RSJD AHM Yang Berfungsi Dengan Baik	85,73 %	
3.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	
3.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	
4	Peningkatan pelayanan BLUD	Samarinda	Persentase pendapatan terhadap target	100%	
4.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Samarinda	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Samarinda	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSJD Atma Husada Mahakam	100%	
5.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	Nilai Aspak	91,85 %	

No.	Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
5.1	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Samarinda	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	512 Unit	
5.2	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Samarinda	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	574 Unit	
5.3	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Samarinda	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	
6	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	Persentase capaian jenis layanan yang tersedia	100 %	
6.1	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Samarinda	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH



- 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
- 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH
- 3.3. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Tujuan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia

Menurut UU No. 18 tahun 2014, upaya kuratif merupakan kegiatan pemberian pelayan kesehatan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang mencakup proses diagnosis dan penatalaksanaan yang tepat sehingga ODGJ dapat berfungsi kembali secara wajar di lingkungan keluarga, lembaga, dan masyarakat. Sedangkan upaya rehabilitatif merupakan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan jiwa yang ditujukan untuk mencegah atau mengendalikan disabilitas, memulihkan fungsi sosial, memulihkan fungsi operasional, serta mempersiapkan dan memberi kemampuan ODGJ agar mandiri di masyarakat.

Dalam melakukan upaya kuratif dan rehabilitatif, Kementerian Kesehatan menyasar pada kemudahan akses agar masyarakat tidak hanya bisa ditangani di rumah sakit, tetapi juga di puskesmas. Dr. Fidiansjah menyatakan untuk saat ini, sudah ada beberapa daerah yang memiliki psikolog klinis di puskesmas. Untuk mengatasi ketimpangan jumlah psikolog klinis yang terdapat di tiap daerah, Kemenkes berupaya melakukan pendelegasian wewenang kepada dokter dan tenaga perawat

untuk melakukan pertolongan pertama kepada ODGJ. Dokter dan tenaga perawat diberikan sebuah workshop agar ilmu dari tenaga profesi rumah sakit jiwa dapat tersalurkan, mampu untuk menangani masalah kejiwaan, dan mempercepat proses intervensi sebelum terlambat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan, maka strategi pembangunan kesehatan 2005-2026 adalah :

1. pembangunan nasional berwawasan kesehatan.
2. pemberdayaan masyarakat dan daerah.
3. pengembangan upaya dan pembiayaan kesehatan.
4. pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.
5. penanggulangan keadaan darurat kesehatan.

Permasalahan kesehatan jiwa sangat besar dan menimbulkan beban kesehatan yang signifikan. Data dari Riskesdas tahun 2013, prevalensi gangguan mental emosional (gejala-gejala depresi dan ansietas), sebesar 6% untuk usia 15 tahun ke atas. Hal ini berarti lebih dari 14 juta jiwa menderita gangguan mental emosional di Indonesia. Sedangkan untuk gangguan jiwa berat seperti gangguan psikosis, prevalensinya adalah 1,7 per 1000 penduduk. Ini berarti lebih dari 400.000 orang menderita gangguan jiwa berat (psikotis). Angka pemasungan pada orang dengan gangguan jiwa berat sebesar 14,3% atau sekitar 57.000 kasus gangguan jiwa yang mengalami pemasungan.

Konsep upaya kesehatan mental di Indonesia yaitu kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan mental yang optimal bagi setiap individu, keluarga dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Pelaksanaan upaya kesehatan jiwa berdasarkan asas keadilan, perikemanusiaan, manfaat, transparansi, akuntabilitas, komprehensif, perlindungan, serta non diskriminasi.

Kondisi kesehatan jiwa di Indonesia saat ini semakin perlu diperhatikan. Data Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa 7 dari

1000 Rumah Tangga terdapat anggota keluarga dengan Skizofrenia/Psikosis. Lebih dari 19 juta penduduk usia di atas 15 tahun terkena gangguan mental emosional, lebih dari 12 juta orang berusia diatas 15 tahun diperkirakan mengalami depresi. Kondisi ini telah menyerap dana BPJS Kesehatan sebesar 730 miliar.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif juga terus dilakukan. Keempat upaya tersebut harus memerhatikan 4 aspek yaitu fisik, mental, sosial dan spiritual guna mencapai individu sehat jiwa.

Berdasarkan hasil Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) tahun 2018, Indonesia memiliki prevalensi rumah tangga dengan gangguan jiwa skizofrenia atau psikosis sebesar 7 per 1.000, artinya setiap 1000 penduduk Indonesia, terdapat 7 kasus penderita skizofrenia. Angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2013 yang berkisar di angka 1,7 per 1.000. Selain itu, prevalensi gangguan emosional pada penduduk berumur lebih dari 15 tahun pada tahun 2018 mencapai 9,8%, angka ini juga mengalami peningkatan dari tahun 2013 yang sebelumnya sebesar 6%. Peningkatan masalah kesehatan jiwa ini menunjukkan perlunya perhatian khusus terhadap kesehatan jiwa masyarakat Indonesia. Upaya bersama antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

Sebagai langkah awal untuk mengatasi masalah kesehatan jiwa, pemerintah telah melakukan revisi terhadap UU No. 18 Tahun 2014 yang dijadikan sebagai landasan utama mengenai aturan kesehatan jiwa di Indonesia. Pada pasal satu dijelaskan bahwa kesehatan jiwa adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. UU No. 18 Tahun 2014 ditujukan untuk menjamin setiap orang agar dapat mencapai kualitas hidup yang baik, serta memberikan pelayanan

kesehatan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Upaya promotif dan preventif termasuk dalam upaya pencegahan. Sedangkan upaya pengobatan, berupa upaya kuratif dan rehabilitatif. Sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2014, upaya promotif merupakan suatu kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa yang bersifat promosi kesehatan jiwa. Upaya promotif bertujuan agar kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan jiwa dapat meningkat. Sedangkan upaya preventif merupakan suatu kegiatan untuk mencegah terjadinya masalah kejiwaan dan gangguan jiwa. Menurut Riskesdas tahun 2018, dari total penduduk berumur lebih dari 15 tahun yang mengalami depresi, hanya 9% yang melakukan pengobatan. Stigma atau anggapan negatif menjadi salah satu alasan masyarakat Indonesia enggan berkonsultasi ke psikolog/psikiater.

Pemerintah mulai menjadikan tindakan preventif sebagai fokus utamanya. Pemerintah bersama dengan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) mulai memberikan edukasi mengenai cara menjadi ibu hamil yang tangguh, baik secara fisik maupun emosional sang ibu selama mengandung. Tidak hanya itu, disediakan pula konseling pra-nikah, edukasi parenting, hingga penyuluhan program yang berfokus kepada sekolah. Program yang berfokus pada sekolah dilakukan melalui guru konseling atau BK, umumnya konselin tersebut mengenai tindakan perundungan (bullying), seksual, dan sebagainya yang dilaporkan dengan rapor kesehatan.

Rencana Strategis RSJD Atma Husada Mahakam untuk tahun 2025 - 2026 disusun untuk mendukung pencapaian upaya pelayanan dibidang kesehatan, terutama dibidang kesehatan jiwa dan napza. Kebijakan nasional yang telah dirumuskan tersebut kemudian menjadi acuan untuk perumusan kebijakan pemerinatah Provinsi Kalimantan Timur dan akhirnya menjadi pedoman pula dalam penentuan kebijakan SKPD kesehatan. Pada RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur kebijakan yang di ambil adalah sebagai berikut :

1. Memfasilitasi Diklat bagi SDM sesuai kompetensinya
2. Memfasilitasi peningkatan, pemeliharaan dan pemerataan jumlah sarana dan prasarana yang standar.
3. Memfasilitasi ketersediaan SOP dan pelaksanaanya.
4. Memfasilitasi tersedianya fasilitas administrasi perkantoran.
5. Memfasilitasi upaya pelayanan kesehatan jiwa di masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan, maka Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur merumuskan Tujuan: *Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.*

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran strategis Dinas Kesehatan berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut:

- | | |
|-----------|--|
| Tujuan 1 | : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat |
| Sasaran 1 | : Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan sesuai standar |
| Sasaran 2 | : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah |

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2026 secara keseluruhan adalah 2 (Dua) program, 6 (tiga) kegiatan, dan 11 (lima) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan :
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, melalui sub kegiatan:
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan, melalui sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- d. Peningkatan pelayanan BLUD, melalui sub kegiatan:
 - 1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - e. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
 - 1) Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit
 - 2) Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
 - 3) Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
 - f. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
 - 1) Operasional Pelayanan Rumah Sakit

Lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada RSJD Atma Husada Mahakam sebagian besar dilaksanakan di Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. RSJD Atma Husada Mahkam berkomitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat secara luas, tidak membatasi dari golongan mana saja, sehingga kelompok sasaran

untuk program, kegiatan dan sub kegiatan RSJD Atma Husada Mahakam adalah konsumen dan karyawan RSJD Atma Husada Mahakam.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH



4.1. Rencana Dan Pendanaan RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur

Renja merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan Rencana Kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah. Penyusunan Renja RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur berpedoman pada Renstra RSJD Atma Husada Mahakam Prov. Kaltim. Penyusunan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

Renja RSJD Atma Husada Mahakam tahun 2026 telah disusun dan sebelum ditetapkan menjadi dokumen Renja, perlu dilakukan review terhadap RKPD Provinsi Kalimantan Timur dan telah sesuai dengan RKPD dengan 2 nomenklatur program yaitu: **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.**

Dalam mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan, maka Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur merumuskan **Tujuan: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran strategis Dinas Kesehatan berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut: Atma Husada Mahakam berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan sesuai standar

Sasaran 2 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Organisasi
Perangkat Daerah

Dengan adanya permasalahan dan kendala yang dihadapi RSJD Atma Husada Mahakam jika dikaitkan dengan tujuan RSJD Atma Husada Mahakam yang berupaya untuk memberikan pelayanan kesehatan jiwa dan Napza yang berkualitas untuk mendukung dan ikut serta dalam pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing sesuai dengan misi pemerintah daerah dapat menemui kendala. Karena untuk menciptakan manusia yang memiliki daya saing tidak cukup hanya memiliki kesehatan fisik saja tetapi juga dibutuhkan kesehatan mental yang optimal. Kebutuhan dana / pagu indikatif untuk menjalankan keseluruhan program adalah **Rp. 102.951.646.000,00** yang bersumber dari APBD dan BLUD Provinsi Kalimantan Timur.

Secara umum program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada Renja RSJD Atma Husada Mahakam tahun 2026 telah selaras dengan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026, hal ini dapat dilihat dari tabel 4.1. (T-C 33) yaitu review terhadap RKPD dengan analisis kebutuhan RSJD Atma Husada Mahakam telah sesuai.

Tabel 4.1 (T-C 33)

Rumusan Renja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Nama Perangkat Daerah : RSJD Atma Husada Mahakam

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	Samarinda	100 %	101.889.457.000,00	APBD		100 %	109.874.817.283,00
							Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		98,42 Indeks		APBD		98,43 Indeks	
1	02	01	1	01		Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan	Samarinda	0 %	0	APBD		0 %	0
1	02	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	0 Dokumen	0	APBD		0 Dokumen	0
1	02	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	0 Laporan	0	APBD		0 Laporan	0
1	02	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan pelaksanaan penatausahaan keuangan tepat Waktu (RSJD Atma Husada Mahakam)	Samarinda	100 %	70.408.259.985,00	APBD		100 %	76.346.047.000,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	410 Orang/Bulan	70.155.179.985,00	APBD		409 Orang/Bulan	76.065.610.000,00
1	02	01	1	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	12 Dokumen	253.080.000,00	APBD		12 Dokumen	280.437.000,00
1	02	01	1	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	0 Dokumen	0	APBD		0 Dokumen	0
1	02	01	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pakaian kerja pegawai (RSJD Atma Husada Mahakam)	Samarinda	0 %	0	APBD		0 %	0
1	02	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	0 Paket	0	APBD		0 Paket	0
1	02	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Rumah Sakit (RSJD Atma Husada Mahakam)	Samarinda	0 Dokumen	0	APBD		0 Dokumen	0
1	02	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Samarinda	0 Paket	0	APBD		0 Paket	0

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Samarinda	0 Paket	0	APBD		0 Paket	0
1	02	01	1	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Samarinda	0 Paket	0	APBD		0 Paket	0
1	02	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan Yang Disediakan	Samarinda	0 Paket	0	APBD		0 Paket	0
1	02	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	0 Laporan	0	APBD		0 Laporan	0
1	02	01	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketepatan Pengadaan sesuai perencanaan (RSJD Atma Husada Mahakam)	Samarinda	0 %	0	APBD		0 %	0
1	02	01	1	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Samarinda	0 Paket	0	APBD		0 Paket	0
1	02	01	1	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Samarinda	0 Unit	0	APBD		0 Unit	0
1	02	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Nilai Survei kepuasan pegawai terhadap kenyamanan ditempat kerja (RSJD Atma Husada Mahakam)	Samarinda	86,12%	7.036.927.815,00	APBD		100%	7.845.110.000,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	0 Laporan	0	APBD		1 Laporan	9.075.000
1	02	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Samarinda	48 Laporan	2.023.006.015,00	APBD		48 Laporan	2.481.527.000,00
1	02	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Samarinda	3 Laporan	5.013.921.800,00	APBD		3 Laporan	5.363.583.000,00
1	02	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase Kendaraan Dinas Pada RSJD AHM Yang Berfungsi Dengan Baik	Samarinda	85,73 %	444.269.200,00	APBD		100%	683.660.283,00
1	02	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Samarinda	1 Unit	42.320.000,00	APBD		1 Unit	51.207.198,00
1	02	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Samarinda	27 Unit	401.949.200,00	APBD		29 Unit	632.453.085,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Operasional atau Lapangan								
1	02	01	1	10		Peningkatan pelayanan BLUD	Persentase pendapatan hasil pelayanan terhadap target BLUD (RSJD Atma Husada Mahakam)	Samarinda	100 %	24.000.000.000,00	BLUD		100 %	25.500.000.000
1	02	01	1	10	01	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Samarinda	1 Unit Kerja	24.000.000.000,00	BLUD		1 Unit Kerja	25.500.000.000
1	02	02				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	Samarinda	100 %	1.062.189.000,00	APBD		100%	1.756.557.380,00
1	02	02	1	01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Nilai Aspak	Samarinda	91,85 %	905.389.000,00	APBD		91,87 %	1.353.957.380,00
1	02	02	1	01	02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Samarinda	0 Unit	0	APBD		0 Unit	0
1	02	02	1	01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang	Samarinda	0 Unit	0	APBD		0 Unit	0

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Rumah Sakit Kesehatan Lainnya	Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit							
1	02	02	1	01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Samarinda	0 Unit	0	APBD		0 Unit	0
1	02	02	1	01	16	Pengadaan barang penunjang operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	Samarinda	512 Unit	341.914.200,00	APBD		2.915 Unit	747.033.733
1	02	02	1	01	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Samarinda	574 Unit	415.841.900,00	APBD		473 Unit	457.426.090
1	02	02	1	01	27	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Samarinda	1 Paket	147.632.900,00	APBD		4 Paket	149.497.557,00
1	02	02	1	02		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM	Persentase capaian jenis layanan yang tersedia	Samarinda	100%	156.800.000,00	APBD		57,14%	402.600.000,00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
						dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								
1	02	02	1	02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Samarinda	0 Dokumen	0	APBD		0 Dokumen	0
1	02	02	1	02	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Samarinda	1 Dokumen	156.800.000,00	APBD		2 Dokumen	202.128.495
1	02	02	1	03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Jumlah Modul Sistem Informasi Yang Terintegrasi	Samarinda	0 %	0	APBD		0 %	0
1	02	02	1	03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Samarinda	0 Dokumen	0	APBD		0 Dokumen	0
1	02	03				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehataaan Yang Ditingkatkan Kompetensinnya (RSJD Atma Husada Mahakam)	Samarinda	0 %	0	APBD		0 %	0
1	02	03	1	02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya	Persentase capaian SDM Kesehatan yang dikembangkan mutunya	Samarinda	0 %	0	APBD		0 %	0

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	dan ditingkatkan kompetensi teknisnya							
1	02	03	1	02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi SDM Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Samarinda	0 Orang	0	APBD		0 Orang	0
Total Renja									102.951.646.000,00			111.631.374.663,00		

BAB V

PENUTUP



5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja 2026

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025-2029. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renja RSJD Atma Husada Mahakam tahun 2026 harus menerangkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparan, dan akuntabilitas.

Renja RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur yang didalamnya mencakup tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun ini agar dapat dipakai oleh rumah sakit sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan dibidang kesehatan.

Adanya Renja ini diharapkan agar RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur serta seluruh aparatnya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sesuai dengan terbitnya Permendagri 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 sehingga didalam penyusunan Renja RSJD Atma Husada Mahakam tahun 2026 harus menyesuaikan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan jangka panjang dan menengah Daerah.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Diharapkan ke depan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam mampu mengatasi kendala-kendala yang timbul di dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa, baik berbagai kendala intern rumah sakit maupun kendala yang dirasakan masyarakat sebagai konsumen layanan kesehatan jiwa, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan RSJD Atma Husada Mahakam antara lain :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital. Transformasi pelayanan publik dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi dan kepuasan pasien. Fokus utama adalah pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) dan percepatan implementasi *e-rekam medis* secara terintegrasi.
- b. Penguatan layanan kesehatan terpadu dan terintegrasi. Sebagai Rumah Sakit dengan Kekhususan Jiwa. RSJD AHM akan berfokus untuk mengembangkan layanan dan meningkatkan layanan kekhususannya.
- c. Kolaborasi jejaring pengampuan jiwa. Sebagai rumah sakit jiwa regional, RSJD Atma Husada Mahakam terus memperkuat jejaring layanan melalui kolaborasi dengan RS pengampu yaitu RS Jiwa Soeroyo Magelang dan fasilitas kesehatan rujukan di daerah. Kolaborasi ini mencakup pendampingan teknis, rujukan dua arah, peningkatan kapasitas SDM, hingga pengembangan sistem pelaporan terintegrasi. Tujuannya adalah menciptakan sistem layanan jiwa yang efektif, efisien, dan menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Timur dengan menggunakan strategi Strategi Pengampuan Pelayanan Kesehatan Jiwa di Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- d. Penguatan tata kelola manajemen berbasis kinerja dilakukan melalui penerapan sistem manajemen kinerja yang transparan, terukur, dan akuntabel. Setiap unit kerja akan dievaluasi secara berkala berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja individu (IKI) guna memastikan ketercapaian target

organisasi. Selain itu, penguatan dilakukan dengan memperbaiki alur pelaporan, pengambilan keputusan berbasis data, serta sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja rumah sakit.

- e. Penegakan budaya kerja ASN BerAKHLAK. RSJD Atma Husada Mahakam meneguhkan komitmennya dalam membentuk karakter ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan. Nilai-nilai ASN BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) ditanamkan melalui pelatihan, kampanye internal, dan keteladanan pimpinan. Penegakan budaya kerja ini juga diperkuat melalui mekanisme *reward* dan *punishment* yang adil dan berbasis kinerja.
- f. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan untuk menjamin mutu layanan. RSJD AHM akan menyelenggarakan pelatihan teknis, workshop, serta sertifikasi profesi sesuai bidang masing-masing, termasuk dalam penanganan gangguan jiwa, Napza, kesehatan jiwa komunitas, dan kegawatdaruratan psikiatri. Kegiatan ini dilakukan secara rutin dan berjenjang, serta didukung kolaborasi dengan institusi pendidikan dan rumah sakit pengampu.
- g. Penguatan fungsi rumah sakit pendidikan. Sebagai rumah sakit pendidikan, RSJD AHM akan mengoptimalkan perannya dalam mendukung kegiatan pendidikan profesi, magang, dan koasisten dari berbagai institusi pendidikan kesehatan. Penguatan dilakukan melalui penyiapan SDM pembimbing, pengembangan modul pembelajaran klinis, serta penciptaan lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Rumah sakit juga mendorong keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pelayanan untuk memperkaya pengalaman klinis mereka.
- h. Pengembangan riset dan inovasi. Untuk mendorong praktik berbasis bukti (*evidence-based practice*), rumah sakit berkomitmen mengembangkan kegiatan penelitian dan inovasi di bidang kesehatan jiwa dan manajemen rumah sakit. Staf medis dan tenaga

fungsional didorong untuk melakukan penelitian terapan, publikasi ilmiah, dan penciptaan inovasi pelayanan. Penelitian diarahkan untuk menjawab isu aktual di lapangan dan hasilnya digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan serta peningkatan mutu layanan.

Semoga Rencana Kerja (Renja) RSJD Atma Husada Mahakam ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja dan Anggaran (RKA) tahun Anggaran 2026.

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 39 tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026. RENJA Perangkat Daerah ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran program/kegiatan/sub kegiatan yang diselaraskan dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009